Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Taiwan Terhadap *China-Oriented* ke *the United States-Oriented* Tahun 2012-2020 Ditinjau dari Perspektif *Decision Making*

SKRIPSI

Oleh :

M Habib Pashya

18323132

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Taiwan Terhadap *China-Oriented* ke *the United States-Oriented* Tahun 2012-2020 Ditinjau dari Perspektif *Decision Making*

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagai dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh :

M Habib Pashya

18323132

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

Halaman Pengesahan

Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Taiwan Terhadap *China-Oriented* ke *the United States-Oriented* Tahun 2012-2020 Ditinjau dari Perspektif *Decision Making*

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Pada Tanggal
31 Maret 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A

Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. M. Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D.	
2. Wili Ashadi, S.H.I., M.A.	
3. Wahyu Arif Raharjo, S.IP., M.Int.Rel.	

Pernyataan Integritas Akademik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 2 Maret 2022



M Habib Pashya

Daftar Isi

Halaman Pengesahan ..... **iii**

Pernyataan Integritas Akademik ..... **iv**

Daftar Isi ..... **v**

Daftar Gambar ..... **viii**

Daftar Tabel ..... **ix**

Daftar Grafik ..... **x**

Daftar Singkatan ..... **xi**

Abstrak ..... **xiii**

BAB I Pendahuluan **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Tujuan 7

1.4 Signifikansi Penelitian 7

1.5 Cakupan Penelitian 8

1.6 Kajian Pustaka 9

1.7 Kerangka Pemikiran 12

1.8 Argumen Sementara 16

1.9 Metodologi 16

1.9.1 Jenis Penelitian 16

1.9.2 Subjek dan Objek Penelitian 17

1.9.3 Metode Pengumpulan Data 17

1.9.4 Proses Pengumpulan Data 17

1.10 Sistematika Pembahasan 18

BAB II Hubungan Ekonomi dan Keamanan-Militer Taiwan Terhadap Tiongkok dan Amerika Serikat 19

2.1 Perkembangan Hubungan Ekonomi Taiwan dan Tiongkok 20

2.1.1 Masa Pemerintahan Ma Ying-jeou dan Xi Jinping 20

2.1.2 Masa Pemerintahan Tsai Ing-wen dan Xi Jinping 24

2.2 Perkembangan Hubungan Politik Keamanan-Militer Taiwan dan Tiongkok 25

2.2.1 Masa Pemerintahan Ma Ying-jeou dan Xi Jinping 25

2.2.2 Masa Pemerintahan Tsai Ing-wen dan Xi Jinping 26

2.3 Perkembangan Hubungan Ekonomi Taiwan dan Amerika Serikat..... 28

2.3.1 Masa Pemerintahan Ma Ying-jeou dan Barack Obama 28

2.3.2 Masa Pemerintahan Tsai Ing-wen dan Donald Trump..... 30

2.4 Perkembangan Hubungan Politik Keamanan-Militer Taiwan dan Amerika Serikat 32

2.4.1 Masa Pemerintahan Ma Ying-jeou dan Barack Obama 32

2.4.2 Masa Pemerintahan Tsai Ing-wen dan Donald Trump..... 34

2.5 Hubungan AS - Tiongkok yang Berdampak Terhadap Posisi Taiwan 37

BAB III Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Kebijakan Luar Negeri Taiwan Terhadap *China-Oriented* ke *the United States-Oriented* Ditinjau dari Perspektif *Decision Making*..... 41

3.1 Faktor Internal..... 42

3.1.1 Opini Publik: Implikasi Kebijakan Luar Negeri Taiwan yang Condong Ke Arah Tiongkok Menimbulkan *Sunflower Movement* 42

3.1.2 Politik Domestik: Pengaruh Ideologi Partai DPP yang Berorientasi ke Amerika Serikat 48

3.2 Faktor Eksternal 52

3.2.1 Politik Internasional: Penolakan Terhadap Satu Negara Dua Sistem dan Satu Tiongkok 52

3.2.2 Politik Internasional: Kemenangan Donald Trump di Pemilu AS Berdampak ke Taiwan..... 56

BAB IV 61

Penutup 61

4.1 Kesimpulan 61

4.2 Saran..... 63

Daftar Pustaka..... 65

Daftar Gambar

Gambar 1 Peta Teori *Decision Making* 13
Gambar 2 Peta Operasi PLA di Taiwan 60

Daftar Tabel

Tabel 1 Dialog ARATS-SEF 21
Tabel 2 Daftar Investor di Tiongkok tahun 2015 22
Tabel 3 Ringkasan Operasi PLA di Taiwan tahun 2020 27
Tabel 4 *Arms Sales* Amerika Serikat ke Taiwan Tahun 2015 33
Tabel 5 Penjualan Alat-Alat Militer ke Taiwan di Era Donald Trump 35
Tabel 6 Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Perubahan Kebijakan Luar Negeri Taiwan 42

Daftar Grafik

Grafik 1 Dukungan Publik terhadap Okupasi di Legislatif Taiwan Tahun 2014 ..44

Daftar Singkatan

ADIZ	: Air Defence Identification Zone
AIT	: American Institute in Taiwan
ARATS	: Association for Relations Across the Taiwan Straits
ARIA	: Asia Reassurance Initiative Act
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: Association Southeast Asian Nations
BTA	: Bilateral Trade Agreement
CSIS	: Center for Strategic and International Studies
CSSTA	: Cross-Strait Investment Protection and Promotion Agreement
DPP	: Democratic Progressive Party
ECFA	: Economic Cooperation Framework Agreement
GCTF	: Global Cooperation and Training Framework
GDP	: Gross Domestic Product
HI	: Hubungan Internasional
ICAO	: International Civil Aviation Organization
INTERPOL	: International Criminal Police Organization
KMT	: Kuomintang
MAC	: Mainland Affairs Council
NPP	: New Power Party
NSP	: New Southbound Policy
ODC	: Overall Defense Concept
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PKT	: Partai Komunis Tiongkok
PLA	: People's Liberation Army
SEF	: The Straits Exchange Foundation
TAO	: Taiwan Affairs Office
TIFA	: Trade Investment Framework Agreement
TPP	: Trans-Pacific Partnership
TRA	: Taiwan Relations Act
TSMC	: Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation

UNPO	: Unrepresented Nations and Peoples Organization
UU	: Undang-Undang
WHO	: World Health Organization

Abstrak

Penelitian ini akan berfokus kepada perubahan kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok ke Amerika Serikat. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini juga menggunakan dari William D. Coplin yaitu pengambilan keputusan. Sejak Tsai Ing-wen (DPP) terpilih menjadi Presiden Taiwan tahun 2016, kebijakan luar negeri Taiwan lebih condong ke arah Amerika Serikat dalam bidang kerja sama ekonomi maupun keamanan dan pertahanan. Kebijakan luar negeri Taiwan mengalami perubahan dengan dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah kemenangan Donald Trump dalam pemilu AS. Di sisi lain, perubahan arah ini tidak disetujui oleh Tiongkok dengan alasan bahwa hal ini akan mempengaruhi proses penyatuan Tiongkok melalui konsep satu negara dua sistem. Maka daripada itu, untuk melakukan pencegahan, Tiongkok mengirimkan militer ke perbatasan Taiwan.

Kata Kunci: Perubahan kebijakan luar negeri Taiwan, Tiongkok, Amerika Serikat, Pengambilan keputusan.

Abstract

This study will focus on Taiwan's foreign policy changes toward China to the United States. This study uses qualitative methods and uses William D. Coplin's decision-making. Since Tsai Ing-wen (DPP) was elected President of Taiwan in 2016, Taiwan's foreign policy has been more inclined towards the United States in the fields of economic cooperation as well as security and defense. Taiwan's foreign policy has changed, influenced by several factors. One of them is the victory of Donald Trump in the US election. On the other hand, this change of direction was not approved by China because it would affect the process of unifying China through the concept of one country, two systems. Therefore, China sent the military to the Taiwan border to take precautions.

***Keywords**: The changing of Taiwan foreign policy, China, the United States, Decision making.*

BAB I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Tahun 1949, Partai Komunis Tiongkok (PKT) berhasil mengalahkan Partai Nasionalis, Kuomintang (KMT) dalam Perang Sipil (Lary 2015). Kekalahan tersebut membawa KMT terlempar ke selatan Tiongkok yang kini dikenal sebagai Taiwan atau Republik Tiongkok (Li 2019). Pengambilan kekuasaan tersebut membuat Tiongkok mendapat pengakuan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui kebijakan satu Tiongkok (Chiang 2017). Kebijakan ini diciptakan saat Tiongkok membuka hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat pada tahun 1979 (Gong, Kirby, and Ross 2007). Hubungan tersebut ditandai dengan pertemuan Presiden AS, Jimmy Carter dan Presiden Tiongkok, Deng Xiaoping (Ibid). Fakta-fakta tersebut berakibat besar bagi Taiwan. Taiwan menjadi negara yang terisolasi di Asia Timur tidak diakui sebagai negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Posisi Taiwan dalam dunia internasional semakin tersudut setelah KMT bertemu dengan pemerintah Tiongkok yang menghasilkan kesepakatan Konsensus 1992 (Su 2008).

Setelah kalah Perang Sipil, Taiwan membangun sistem politik domestik. Tahun 1949, Partai Kuomintang menjadi satu-satunya partai yang berkuasa (Fell 2018). Namun di tahun 1986, KMT mendapatkan pertentangan dari kelompok oposisi yang mendirikan partai liberal yaitu *Democratic Progressive Party* (DPP) (Rigger 2001). Perubahan domestik tersebut tidak hanya berpengaruh pada komposisi partai melainkan juga terhadap kebijakan luar negeri. Kedekatan KMT dengan Tiongkok menjadi alasan bahwa rakyat Taiwan memperjuangkan adanya

perubahan. Masyarakat Taiwan berargumen kedekatan tersebut membawa pengaruh negatif terhadap politik Taiwan maupun ekonomi yang terlalu bergantung pada Tiongkok. Terbukti pada pemilu tahun 2000, DPP memenangkan pemilu untuk pertama kali meskipun nantinya dikontrol kembali oleh KMT di tahun 2008 (Copper 2013). Namun, kekuasaan KMT kembali mengalami perubahan pada pemilu 2016 dengan terpilihnya Tsai Ing-wen.

Kontestasi KMT dan DPP berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri terutama membuka kerja sama dengan AS dan Tiongkok. Dalam sejarahnya, kedekatan Taiwan terhadap AS dan Tiongkok ditopang oleh kerja sama dalam bidang ekonomi dan keamanan. Di samping itu, meskipun AS tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, AS memiliki hak untuk bertransaksi persenjataan militer yang dituliskan di dalam *Taiwan Relations Act* (TRA) tahun 1979 (Ger 2015, 235). Namun, perjanjian ini pernah ditentang oleh Tiongkok pada Agustus 1982 dengan alasan AS telah memberikan Taiwan senjata militer yang berlebih. Dilema antara hubungan kerja sama tersebut meningkat secara signifikan selama 2012-2020.

Ma Ying-jeou (KMT) yang menjalankan periode keduanya di tahun 2012 sejak tahun 2008 telah menandatangani kerja sama ekonomi yang besar dengan Tiongkok (Copper 2013). Di tahun 2010, Taiwan dan Tiongkok melalui perwakilannya mengesahkan *the Economic Cooperation Framework Agreement* (ECFA) (Hu 2013). Salah satu tujuan terbentuknya ECFA adalah promosi mengenai perdagangan bebas pada sektor barang dan jasa. Namun, secara spesifik, kerja sama ECFA berkembang dengan kembali ditandatangani *the Cross-Strait Investment Protection and Promotion Agreement* (CSSTA) tahun 2013. Melalui

CSSTA, Taiwan sepakat akan membuka pasar investasi bagi Tiongkok dalam bidang jasa. Yuen (2014) menemukan bahwa Tiongkok akan membuka 80 industri dan Taiwan akan membuka 64 industri (Yuen 2014, 70). Sebagai pasar yang kecil, diharapkan Taiwan mendapatkan keuntungan yang besar melalui kesepakatan tersebut.

Namun, ketika berencana untuk diratifikasi, CSSTA mendapatkan penolakan dari masyarakat Taiwan yang nantinya diberikan nama *sunflower movement* (Fell 2017). Sejalan dengan kesepakatan tersebut, hubungan ekonomi Tiongkok dan Taiwan dalam aspek perdagangan dan investasi dalam angka yang membaik. Bahkan, Taiwan masuk ke dalam 10 besar investor di Tiongkok. Hingga tahun 2016, hubungan kedua negara termasuk ke dalam *golden age* atau masa keemasan (Wiratama 2017). Terbukti di tahun 2015, Taiwan dan Tiongkok untuk pertama kalinya bertemu di Singapura dengan membahas mengenai prospek ekonomi (Taiwan News 2015).

Berbeda dengan Tiongkok, kerja sama yang terjalin antara Taiwan-Tiongkok tidak berjalan secara signifikan. Secara statistik perdagangan, nilai dagang AS-Taiwan tidak terlalu besar dibandingkan Taiwan-Tiongkok. Di samping itu, peran Presiden AS, Barack Obama juga menjadi faktor utama. Di pemerintahan Obama, AS menjalankan prinsip *strategic ambiguity* (Chow 2014). Temur (2020) menemukan bahwa Obama mengikuti kebijakan untuk memenuhi TRA tanpa merusak hubungan dengan Tiongkok (Temur 2020). Orientasi kebijakan ini juga diikuti oleh "pivot of Asia" yang berarti Obama juga mencoba untuk mengimbangi dominasi Tiongkok tanpa mengasingkan Taiwan di kawasan Asia (Wang 2016). Di lain hal, AS juga pernah melakukan pengajuan kepada Taiwan untuk menjadi

anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP) sejak 2014 dalam agenda prioritas dari *Trade of Investment Framework Agreement* (TIFA) (Kotschwar, Schott, and Muir 2013). Namun, pada akhirnya rencana ini ditolak oleh Tiongkok.

Perkembangan hubungan Taiwan terhadap AS dan Tiongkok berubah secara signifikan tahun 2016. Pertarungan panas antara Tsai Ing-wen (DPP) dan Eric Chu (Kuomintang) menghasilkan kemenangan bagi DPP (Taiwan Today 2016). Ada beberapa pertimbangan domestik yang membuat DPP dapat mengambil kursi eksekutif di Taiwan. Salah satu diantaranya adalah isu ekonomi kedekatan Tiongkok dan Taiwan yang diprediksi merugikan ekonomi Taiwan. Tsai menjadi perempuan pertama yang menjadi Presiden Taiwan. Relasi antara Tsai dan DPP dapat dibuktikan dengan menolak adanya kebijakan satu Tiongkok (Ramzy 2016). Bahkan sejak kampanye, slogan anti-Tiongkok tersebar ke seluruh penjuru Taiwan. Tsai yang berorientasi liberal, menginginkan Taiwan untuk tidak bergantung secara ekonomi kepada Tiongkok. Dalam artian, Tsai berencana untuk mendiversifikasi orientasi ekonomi Taiwan dengan cara membuka pasar secara global (CNBC 2020).

Pemilu yang dramatis tersebut sudah diantisipasi oleh pemerintah Tiongkok. Terbukti sebelum adanya pemilu, Tiongkok sempat mengirimkan militer untuk masuk ke perbatasan laut Taiwan. Namun, opini publik masyarakat Taiwan yang pada saat itu sedang tidak stabil, membuat kebijakan Tiongkok tersebut tidak berpengaruh secara berarti. Untuk itu, di bawah pemerintahan Tsai, Taiwan berencana untuk mendekatkan hubungannya dengan AS. Rencana tersebut sejalan dengan pemilu AS di tahun 2016 dimenangkan oleh Donald Trump dari Republik (Zurcher 2016). Bahkan disaat Trump menang, Tsai membuka komunikasi dengan

Trump melalui jalur telepon yang menjadi alarm besar bagi hubungan Tiongkok dan Taiwan.

Di awal pemerintahan, AS memiliki hubungan yang buruk dengan Tiongkok. Trump mengeluarkan kebijakan untuk menaikan tarif dagang terhadap barang impor Tiongkok. Bahkan, Trump memanggil Tiongkok dengan sebutan 'musuh' (Higgins 2019). Tahun 2018, menjadi puncak buruknya hubungan AS-Tiongkok dengan adanya Perang Dagang. Kontestasi AS-Tiongkok tersebut bermanfaat secara seutuhnya bagi Taiwan. Dengan kebijakan yang anti-Tiongkok, Tsai mengambil posisi secara tegas untuk memanfaatkan situasi tersebut melalui bidang ekonomi maupun militer.

Di era Tsai-Trump, hubungan kedua negara di bidang ekonomi meningkat. Secara investasi maupun perdagangan, nilai yang didapatkan melebihi era Ma. Trump membawa kerja sama terhadap Taiwan lebih intensif yaitu melalui *Bilateral Trade Agreement* (BTA) (Carnegie Endowment for International Peace 2021). Di samping itu, Senat AS juga mengesahkan *the Taipei International Protection and Enhancement Initiative* (TAIPEI) *Act* yang berarti menekankan untuk menguatkan kerja sama ekonomi Taiwan serta berkontribusi dalam menguatkan keamanan di kawasan Taiwan. Di tahun 2017, Trump mengesahkan satu paket alat militer kepada Taiwan yang berupa misil dan torpedo dengan total $1,4 miliar (Bendix 2017). Angka tersebut terlampau besar dibandingkan era Barack Obama yang tidak melakukan transaksi dalam kurun 2012-2014.

Kebijakan-kebijakan yang krusial tersebut, direspon oleh Tiongkok. Menurut Tiongkok, AS tidak menaati peraturan internasional mengenai satu Tiongkok dan juga tidak mendukung adanya rencana untuk *reunification*

(penyatuan kembali) kepada Taiwan dalam prinsip satu negara dua sistem (The Wall Street Journal 2021). Dengan dukungan yang besar dari AS, pemerintah Tiongkok juga beranggapan bahwa Taiwan berencana memiliki kebijakan untuk memisahkan diri dari Tiongkok dan menjadi negara yang merdeka. Untuk mengantisipasi aksi tersebut, sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Tiongkok, yakni dengan mengirimkan armada udara maupun laut ke perbatasan Taiwan. Misalnya, di tahun 2017, Tiongkok mengirimkan pesawat terbang ke zona udara Taiwan atau *Air Defence Identification Zone* (ADIZ) (Ministry of National Defense, R.O.C (Taiwan) 2020). Aksi Tiongkok tersebut berlanjut bahkan meningkat hingga tahun 2020. Di tahun itu, tensi antara Taiwan dan Tiongkok kembali meningkat. Terpilih sebagai presiden kembali, Tsai tetap mempermasalahkan mengenai Tiongkok yang tidak dapat ikut campur mengenai Taiwan.

Keagresifan Tiongkok dan dukungan AS terhadap Taiwan menjadi kompleks ketika keduanya mencoba untuk mengambil alih posisi Taiwan. Dukungan AS yang besar, memang membuat Tsai tidak ragu untuk menentang pasukan militer Tiongkok. Hal ini ditambah dengan dukungan domestik Taiwan yang tidak ingin negaranya bergantung secara utuh dengan Tiongkok. Maka dari itu, kejadian-kejadian yang dilalui oleh Taiwan-AS-Tiongkok dalam kurun waktu 2012-2020, menjadi fokus dalam penelitian ini. Sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kebijakan luar negeri Taiwan terhadap AS dan Tiongkok. Penelitian tersebut dapat ditemukan di dalam (Carbestan, 2011; Matsuda, 2015; Dewi and Dewi, 2019). Namun secara spesifik, penelitian ini akan

menguraikan dan menganalisis faktor-faktor lainnya yang membuat Taiwan berubah kebijakan dari *China-oriented* menjadi *the United States-oriented*.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perubahan kebijakan luar negeri Taiwan terhadap *China-oriented* ke *the United States-oriented* tahun 2012-2020?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan hubungan Taiwan terhadap Tiongkok dan Amerika Serikat.
2. Mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Taiwan terhadap *China-oriented* ke *the United States-oriented*.

1.4 Signifikansi Penelitian

Terpilihnya Tsai Ing-wen pada tahun 2016 mengubah orientasi politik luar negeri Taiwan (deLisle and Dreyer 2021). Hal ini terbukti dilakukan oleh Tsai dengan tidak membuka komunikasi dengan Tiongkok. Melalui kampanye Tsai, orientasi luar negeri Taiwan akan lebih condong ke Amerika Serikat. Perubahan sikap tersebut dilakukan oleh Tsai dengan adanya pertimbangan faktor-faktor domestik maupun internasional yang bergantung dengan Tiongkok. Di tahun 2012-2015, pemerintah Ma Ying-jeou meningkatkan kerja sama dengan Tiongkok

melalui CSSTA di tahun 2013 (Chen 2018). Perjanjian tersebut merupakan program lanjutan dari ECFA di tahun 2010.

Politik liberal Tsai ditentang oleh Tiongkok. Pemerintah Tiongkok berargumen bahwa Taiwan mencoba memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan diri dari Tiongkok. Dalam artian, selama era Ma, hubungan Taiwan-Tiongkok cukup erat dengan diwarnai pertemuan diplomatik di Singapura tahun 2015. Atas prinsip Tsai yang berbeda, Tiongkok beberapa kali mengirimkan angkatan udara maupun laut ke daerah perbatasan Taiwan sebagai bentuk pencegahan aksi kemerdekaan (Buckley 2017).

Namun, sikap Tiongkok juga ditentang oleh AS. Sejak Donald Trump terpilih menjadi Presiden AS tahun 2016, AS meningkatkan transaksi militernya dengan Taiwan atas dasar TRA. Di samping itu, AS juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Taiwan. Kebijakan ini menimbulkan tensi di sekitar Selat Taiwan. Beberapa kali, Trump juga menolak aksi yang dilakukan oleh Tiongkok untuk menyatukan Taiwan secara paksa.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis kepada perubahan kebijakan luar negeri Taiwan dalam kurun waktu 2012-2020 terhadap Tiongkok-sentris ke AS-sentris. Kedua aktor tersebut akan diperkuat secara spesifik terhadap dua bidang yaitu ekonomi dan keamanan-militer. Hal ini dilakukan dengan alasan tensi Taiwan dan Tiongkok meningkat sejak Taiwan membangun hubungan yang intensif (militer dan ekonomi) dengan AS di tahun 2016.

Sejak saat itu, Tiongkok merespon bahwa AS tidak menghormati konsep kebijakan satu Tiongkok yang termaktub di dalam PBB. Di samping itu, Tiongkok juga beranggapan bahwa Taiwan tidak menghormati konsep satu negara dua sistem. Sebagai landasan dari kerangka pemikiran, penelitian ini akan menggunakan teori *decision making* dengan menekankan pengaruh internal dan eksternal.

1.6 Kajian Pustaka

Penelitian mengenai kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok dan AS sudah banyak dilakukan dalam dua dekade terakhir. Mengenai data-data penelitian tersebut sudah disajikan melalui publikasi buku, jurnal, maupun artikel ilmiah. Penelitian yang spesifik sudah pernah dilakukan oleh Jean-Pierre Cabestan dalam bagian penelitiannya yang berjudul "The Future of United States, China, and Taiwan Relations". Dalam salah satu fokusnya, Cabestan menekankan ketergantungan Taiwan terhadap Tiongkok dari segi ekonomi, tidak membuat Taiwan berkembang ataupun sejahtera (Cabestan 2011). Argumen yang dibangun oleh Cabestan dalam karya sudah disusun dengan baik. Namun, penelitiannya tidak membahas mengenai keterlibatan AS. Di samping itu, penelitian pun tidak mencakup tahun 2012-2020. Maka daripada itu, penelitian ini akan menyempurnakan penelitian sebelumnya.

Kebijakan Taiwan terhadap Tiongkok dan AS dapat ditemukan dalam buku yang berjudul "Hubungan Luar Negeri Taiwan: Penentu Kebijakan dan Studi Kasus" yang ditulis oleh Taufiq Tanasaldy. Tanasaldy berargumen bahwa kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok dan AS berubah seiring waktu (Tanasaldy 2017). Tanasaldy juga menekankan pengaruh KMT dan DPP dalam

politik Taiwan berpengaruh terhadap kebijakannya ke Tiongkok maupun AS (Ibid). Penelitiannya mengutip konsep *decision making* yang berupa *policy influencer,* yaitu birokrat, partai, kepentingan, dan massa untuk menjelaskan demokratisasi di Taiwan (Ibid). Tanasaldy sudah membangun argumennya dengan baik. Namun, dalam penelitian Tanasaldy hanya menjelaskan sejarah kebijakan Taiwan terhadap Tiongkok dan AS pada tahun 2000an. Sehingga, penelitian ini tentang perubahan yang dilakukan oleh Ma-Ying jeou sampai Tsai Ing-wen yang didasari oleh konsep *decision making* dan rentan waktu 2012-2020.

Selain buku, penelitian ini dibantu oleh jurnal ilmiah yang ditulis oleh Inneke Firsana Dewi dan Karina Utami Dewi dengan judul "Strategi Pemerintahan Xi Jinping Terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok". Penelitian tersebut menekankan kebijakan luar negeri Taiwan yang agresif dapat mengancam status satu Tiongkok (Dewi and Dewi 2019). Dewi dan Dewi berpendapat bahwa kehadiran Tiongkok dapat mengancam keamanan di Taiwan (Ibid). Dewi dan Dewi menekankan tiga aspek utama yaitu kerja sama ekonomi, kerja sama politik, dan militer (Ibid). Hal ini dilakukan untuk merespon kehadiran AS sebagai aktor yang bertanggung jawab menjaga kedaulatan dan keamanan kawasan Taiwan. Argumen yang dibangun dalam tulisan ini sudah baik, namun penelitian ini menggunakan perspektif keamanan dari Buzan. Maka daripada itu, penelitian ini menyempurnakan penelitian sebelumnya dengan melibatkan AS melalui kebijakan luar negeri Taiwan pada 2016 berdasarkan perspektif *decision making*.

Kemudian kebijakan Taiwan dapat ditemukan dalam jurnal yang berjudul "Cross-strait Relations Under the Ma Ying-jeou Administration: From Economic

to Political Dependence" yang ditulis oleh Yasuhiro Matsuda. Matsuda (2015) berargumen bahwa Taiwan dibawah pemerintahan Ma mengalami tekanan dari Tiongkok secara ekonomi dan politik (Matsuda 2015). Penelitiannya juga menyoroti mengenai pembentukan ECFA tahun 2010 yang berimplikasi pada periode Ma yang kedua (Ibid). Matsuda tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai keterlibatan AS dalam kerja sama Selat. Maka daripada itu, penelitian ini juga akan menyempurnakan penelitian Matsuda dengan melibatkan AS dalam kurun waktu 2012-2020.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Tung Chieh Tsai dan Tony Tai Ting Liu, dalam jurnalnya yang berjudul "Cross-Strait Relations and Regional Integration: A Review of the Ma Ying-jeou". Tsai (2017) dan Liu (2017) berpendapat bahwa kebijakan Taiwan pada pemerintahan Ma Ying-jeou sangat bergantung kepada Tiongkok (Tsai and Liu 2017). Hal itu terkait dengan investasi dan jasa bahkan sampai pengurangan tarif. Negosiasi tersebut didorong dengan adanya ECFA pada tahun 2010 atas inisiasi dari pemerintah Taiwan untuk mendorong dalam memperbaiki perekonomian Taiwan pada saat itu. Tsai dan Liu sudah cukup baik membangun argumen dari keterkaitan Taiwan-Tiongkok terhadap ECFA. Namun, penelitian dari Tsai dan Liu tidak melihat pentingnya terbentuk CSSTA mengingat perjanjian tersebut akan berdampak terhadap persepsi dari Tsai Ing-wen. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas terkait dengan program lanjutan dari ECFA masa Ma yang mendapatkan penolakan kuat pada masa Tsai Ing-wen tahun 2016-2020.

Adapun pendapat lainnya terdapat dalam tulisan Gang Lin dan Wenxing Zhou yang berjudul "Does Taiwan Matter to the United States? Policy Debates on

Taiwan Abandonment and Beyond". Lin (2018) dan Zhou (2018) memandang bahwa kebijakan Donald Trump terhadap Tiongkok dapat berimplikasi kepada hubungan AS-Taiwan (Lin and Zhou 2018). Lin (2018) dan Zhou (2018) juga berargumen bahwa tahun 2016 menjadi pertarungan status Taiwan antara AS-Tiongkok yang didukung melalui kerja sama ekonomi dan militer (Ibid). Pendapat yang diutarakan oleh Ling dan Zhou dalam artikelnya menarik untuk dibahas. Namun, tahun penelitian yang dilakukan oleh Liu dan Zhou berhenti di 2018. Ditambah lagi, penelitian tersebut tidak membahas mengenai pandangan politik Taiwan melainkan AS. Maka daripada itu, penelitian ini akan menganalisis dan menyempurnakan penelitian sebelumnya dengan menggunakan rentang waktu 2012-2020.

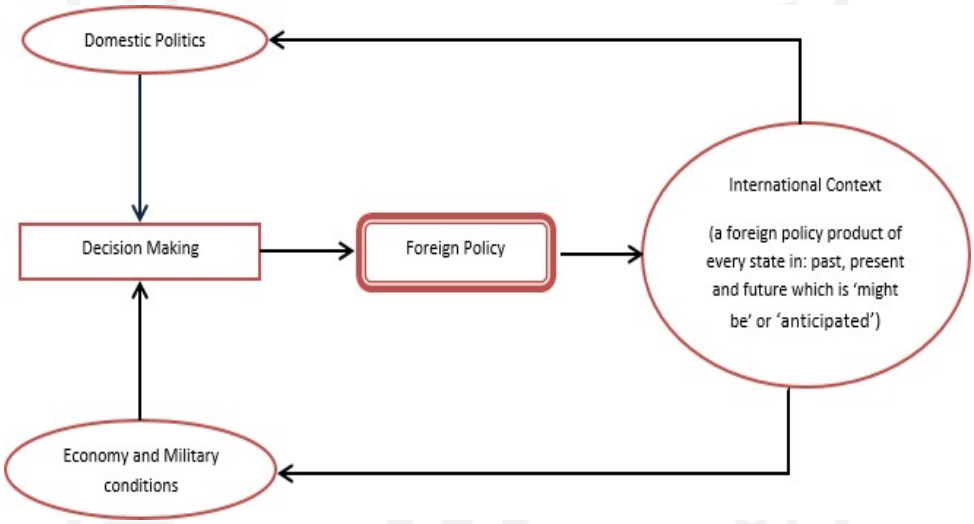
Berdasarkan artikel dan jurnal yang telah diuraikan diatas, telah banyak penelitian yang membahas terkait dengan kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok dan AS. Namun, dari penelitian sebelumnya belum membahas mengenai pandangan-pandangan yang spesifik seperti politik domestik Taiwan serta perubahan sikap Taiwan terhadap Tiongkok dan AS. Dengan menggunakan teori *decision making*, penelitian ini akan menganalisis, mengidentifikasi, serta menyempurnakan kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

1.7 Kerangka Pemikiran

Studi Hubungan Internasional (HI) tidak hanya berfokus terhadap konflik antar negara yang lazimnya digambarkan pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Namun, studi HI juga berfokus mengenai proses pengambilan keputusan dalam melakukan kebijakan luar negeri. Teori ini diperkenalkan oleh William D. Coplin

dalam bukunya yang berjudul "Introduction to International Politic : Model of Decision Making Process" (Coplin and Marbun 2003). Teori Coplin menekankan tiga faktor utama yang menjadi basis suatu negara membuat kebijakan luar negerinya yaitu melalui faktor internal, kapabilitas ekonomi politik, dan faktor eksternal (Ibid).

Gambar 1 Peta Teori *Decision Making*



Sumber: Coplin (2003).

Coplin (2003) menjelaskan bahwa ketiga faktor tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya (Ibid). Coplin (2003) juga menjelaskan bahwa tiga kekuatan tersebut dapat mempengaruhi pengambil kebijakan dalam mengorientasikan kebijakan luar negerinya (Ibid). Pertama, faktor internal menjelaskan terkait dengan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan untuk menekan pengambil kebijakan dalam memutuskan kebijakan. Kelompok kepentingan tersebut dapat bervariasi seperti birokrasi, anggota partai, kelompok kepentingan, dan media

massa. Coplin (2003) menambahkan bahwa kebijakan luar negeri yang hanya diambil oleh negara tidak hanya bergantung pada *policy influencer* tetapi dapat melihat implikasi dari kebijakan sebelumnya (Ibid). Kedua, kapabilitas ekonomi dan militer menjelaskan terkait dengan kekuatan ekonomi dan militer yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri (Ibid). Ketiga, faktor eksternal menekankan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan akan berdasarkan kalkulasi internasional (Ibid). Komponen eksternal tersebut dapat berupa sistem internasional hingga dukungan dari negara lain.

Dalam konteks ini, penulis tidak menggunakan variabel kapabilitas militer dan ekonomi. Hal ini dikarenakan Taiwan tidak memiliki dua aspek tersebutuntuk dapat merubah kebijakan luar negerinya dalam kurun waktu 2012-2020. Misalnya, menurut laporan dari *Global Firepower 2015*, Taiwan tidak masuk ke dalam 10 peringkat teratas dalam kapabilitas militer dunia jika dibandingkan AS (1) dan Tiongkok (3) (Kosenkov 2015). Melalui penelitian ini, penulis hanya menggunakan dua variabel yaitu faktor internal dan eksternal.

Pada faktor internal, penulis menganalisis bahwa *sunflower movement* dan DPP menjadi faktor pendorong besar perubahan kebijakan luar negeri Taiwan sejak Tsai Ing-wen terpilih menjadi Presiden Taiwan. Tsai berfokus pada instabilitas sosial akibat dari CSSTA 2013 mendorong masyarakat untuk melakukan protes hingga mampu menduduki secara paksa kantor legislatif yuan. Instabilitas sosial juga dipengaruhi oleh keresahan masyarakat Taiwan mengenai kedekatan Tiongkok dan Taiwan yang dapat berimplikasi terhadap kinerja ekonomi. Persepsi masyarakat Taiwan menunjukan bahwa kerja sama tersebut hanya menguntungkan elit-elit politik sehingga tidak menciptakan pemerataan sosial.

Pada faktor eksternal, penulis menekankan peran AS yang mendukung secara signifikan dalam membentuk kerja sama militer dan ekonomi. Terlebih Trump terpilih menjadi Presiden AS, sejalan dengan rencana yang dimiliki oleh Tsai. Pada saat itu, masalah yang dimiliki oleh AS cukup kompleks. Diawali, hubungan yang buruk dengan Taiwan, Trump meloloskan beberapa peraturan yang krusial bagi Taiwan yang dapat merugikan Tiongkok. Sikap ini pun direspon positif oleh pemerintah Taiwan. Trump pun mengesahkan anggaran militer yang besar kepada Taiwan dalam kurun waktu 2016-2020. Selain kebijakan agresif Trump, penulis juga mempertimbangkan status Taiwan setelah munculnya kebijakan satu Tiongkok. Kebijakan tersebut merupakan hasil dari kesepakatan negara-negara anggota PBB untuk mengakui Tiongkok sebagai satu-satunya perwakilan Tiongkok (Taiwan tidak termasuk anggota). Dengan kebijakan Taiwan yang progresif, Tsai juga menolak adanya satu negara dua sistem yang diusung oleh Tiongkok terhadap Taiwan. Taiwan menginginkan negara yang bebas dan terbuka secara internasional tanpa dikontrol oleh Tiongkok dalam aspek apapun.

Dua faktor tersebut menjadi fondasi untuk membangun argumen yang kuat terhadap perubahan kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok-sentris ke AS-sentris. Terlebih lagi, dua faktor tersebut akan diselaraskan menggunakan data-data yang relevan dan ilmiah selama kurun waktu 2012-2020.

1.8 Argumen Sementara

Setelah melakukan observasi menggunakan data-data yang relevan, penulis menemukan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kebijakan luar negeri Taiwan berubah dari Tiongkok-sentris menjadi AS-sentris. Faktor-faktor tersebut didasari dengan kerangka pemikiran yang menggunakan teori *decision making* dengan menekankan faktor internal dan eksternal. Secara hipotesis, penulis menggunakan kerja sama ekonomi Taiwan-Tiongkok berupa CSSTA yang mengakibatkan munculnya *sunflower movement*. Gerakan ini menolak ratifikasi CSSTA di legislatif yuan dengan alasan bahwa sejak munculnya ECFA tahun 2010, kebanyakan sektor-sektor ekonomi didominasi oleh investor Tiongkok yang tidak menguntungkan masyarakat Taiwan. Selain itu, kemenangan Donald Trump membawa pengaruh besar ke Taiwan. Hubungan yang buruk antara AS-Tiongkok dalam masa pemerintahan Trump berimplikasi kepada perilaku Trump di Taiwan terutama dalam meningkatkan transaksi militer.

1.9 Metodologi

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Metode ini sering kali digunakan oleh peneliti-peneliti Hubungan Internasional dalam menganalisis studi kasus. Creswell (1999) berargumen bahwa penelitian kualitatif akan menekankan hasil penelitian yang tidak dapat dilakukan melalui pengukuran (Creswell 1999). Tersiana (2018) juga mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif akan menekankan sifat yang lebih deskriptif (Tersiana 2018). Hal ini mengartikan bahwa metode tersebut lebih mengedepankan uraian dari masalah penelitian daripada generalisasi

(Ibid). Maka daripada itu, metode ini akan digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan topik perubahan kebijakan luar negeri Taiwan terhadap *China-oriented* ke *the United States-oriented* tahun 2012-2020.

1.9.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Taiwan atau Republik Tiongkok. Sedangkan objek, akan mengacu kepada perubahan kebijakan luar negeri Taiwa terhadap *China-oriented* ke *the United States-oriented* ditinjau dari perspektif *decision-making*.

1.9.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memfokuskan untuk menganalisis dengan sumber data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan, bahkan berita yang sudah tervalidasi kebenarannya.

1.9.4 Proses Pengumpulan Data

Proses dari penelitian ini dimulai dengan adanya pengumpulan data. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet dengan membaca dan mengunduh buku, jurnal, ataupun laporan yang relevan dengan Taiwan, AS, maupun Tiongkok. Setelah melakukan pengumpulan data, penulis melakukan reduksi data. Hal ini dilakukan dengan tujuan memilah data-data yang lebih spesifik mengenai penelitian tersebut. Dengan data yang sudah spesifik, penulis mulai menyajikan data dalam bentuk narasi sesuai dengan bab/sub-bab yang relevan maupun menyertakan grafik hingga tabel. Terakhir,

penulis membuat kesimpulan terhadap data-data yang sudah dengan sifat sementara. Sehingga, hipotesis tersebut nantinya akan diperkuat dengan data-data berikutnya.

1.10 Sistematika Pembahasan

Secara sistematis, penelitian ini diuraikan menjadi empat bab utama:

- Bab pertama akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, cakupan penelitian, tujuan penelitian, kerangka pemikiran/landasan teori, kajian pustaka, dan metodologi.
- Bab kedua akan menjelaskan mengenai hubungan Taiwan, AS, dan Tiongkok pada bidang keamanan-militer dan ekonomi. Bab ini menjadi pengantar terhadap pengaplikasian teori yang akan dijelaskan di bab 3. Pengantar tersebut diuraikan melalui permasalahan-permasalahan hubungan antara Taiwan, AS, dan Tiongkok.
- Bab ketiga, penulis melakukan pengaplikasian teori Coplin terhadap studi kasus yang sudah direncanakan akan membagi menjadi dua sub-topik utama yaitu melalui faktor internal dan eksternal.
- Terakhir, penulis membuat kesimpulan dan saran yang nantinya berguna untuk merangkum semua data dan kejadian di dalam penelitian serta memberikan rekomendasi agar dapat berguna pada penelitian di masa depan.

BAB II

Hubungan Ekonomi dan Keamanan-Militer Taiwan Terhadap Tiongkok dan Amerika Serikat

Bab I sudah menjelaskan dan menguraikan mengenai latar belakang hingga metodologi yang menjadi basis penelitian ini. Untuk melanjutkan pembahasan, penulis menggunakan bab II untuk menjelaskan konteks yang berguna untuk mengerti pembahasan di bab III. Bab ini akan dibagi menjadi lima sub-bab. Pertama, penulis akan menjelaskan mengenai hubungan Taiwan dan Tiongkok dalam bidang ekonomi. Hal ini akan menyangkut mengenai program lanjutan dari ECFA tahun 2010, statistik mengenai perdagangan hingga investasi. Kedua, penulis akan menjelaskan hubungan politik keamanan-militer dari Taiwan dan Tiongkok yang sering kali akan menyangkut mengenai Konsensus 1992 dan satu Tiongkok, dua sistem.

Ketiga, seperti halnya dua bab sebelumnya, penulis juga menguraikan hubungan ekonomi dan politik keamanan-militer antara Taiwan dan AS. Sejak AS mengakui Tiongkok sebagai negara yang merdeka, keduanya sepakat untuk mengesahkan TRA yang bertujuan untuk menjaga keamanan Taiwan. Kerja sama tersebut berimplikasi hingga tahun 2020. Terakhir, penulis juga menggunakan variabel hubungan AS-Tiongkok yang berdampak pada Taiwan. Komponen ini penting dengan mempertimbangkan pengaruh dua hegemoni tersebut di Taiwan.

2.1 Perkembangan Hubungan Ekonomi Taiwan dan Tiongkok

2.1.1 Masa Pemerintahan Ma Ying-jeou dan Xi Jinping

Tahun 2012 merupakan tanda bagi kemenangan Ma Ying-jeou (KMT), Presiden Taiwan yang berhasil memenangkan pemilu. Dalam agendanya, Ma berencana untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Setelah berhasil meloloskan ECFA, Ma juga berencana untuk melanjutkan program di bawah payung ECFA yaitu *Cross-Strait Investment Protection and Promotion Agreement* (CSSTA) (Thojnar 2016, 140). Kerja sama tersebut dilakukan melalui *Association for Relations Across the Taiwan Straits* (ARATS) dan *The Straits Exchange Foundation* (SEF) yang sudah beroperasi sejak tahun 1990an (Chiu 1993).

Namun, proses ratifikasi CSSTA di dalam legislatif yuan diprotes oleh masyarakat (terutama pelajar) Taiwan (Tseng 2014). Secara substansi, CSSTA menawarkan membuka 80 segmen pasar di Tiongkok dan Taiwan akan membuka 64 pasar industri (Thojnar 2016). Menurut analisis dari *The Chung-Hua Institute for Economic Research* memproyeksikan bahwa melalui CSSTA, *Gross Domestic Product* (GDP) Taiwan akan tumbuh sekitar 0,025-0,034 persen (Rowen 2015). Di samping konflik mengenai CSSTA, hingga 2015, Ma sudah menandatangani 23 perjanjian kerja sama dengan Tiongkok (Mainland Affairs Council 2016). Hal ini membuktikan bahwa integrasi ekonomi yang dilakukan oleh Ma dengan Tiongkok berhasil.

Tabel 1 Dialog ARATS-SEF

No.	Tahun	Tempat	Hasil Perjanjian
1	2012	Taibei	*Cross-Strait Investment Protection and Promotion Agreement; Cross-Strait Customs Cooperation Agreement*
2	2013	Taibei	*Cross-Strait Agreement on Trade in Service*
3	2014	Nanjing	*Cross-Strait Cooperation Agreement on Meteorology; Cross-Strait Agreement on Seismological Monitoring*
4	2015	Fuzhou	*Cross-Strait Collaboration Agreement on Flight Safety and Airworthiness; Cross-Strait Agreement on Avoidance of Double Taxation and Enhancement of Tax Cooperation*

Sumber: Tsai and Liu (2017)

Bahkan, di tengah instabilitas sosial dan politik, SEF dan ARATS (lihat tabel. 1) berkesempatan untuk menandatangani perjanjian kerja sama mengenai pajak tahun 2015. Kerja sama pajak ini digunakan untuk membebaskan pajak bagi perusahaan Taiwan dengan jangka waktu tertentu. Selain itu, juga terdapat *Cross-Strait Customs Cooperation Agreement* yang berguna sebagai bentuk operasi *anti-trafficking*.

Pada periode tersebut, hubungan Taiwan-Tiongkok juga diperkuat dengan adanya transaksi produk semikonduktor. Di Taiwan, semikonduktor menjadi promotor untuk meningkatkan ekonomi Taiwan yang ditopang oleh *Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation* (TSMC). Tiongkok memerlukan produk dari TSMC berupa chip untuk memproduksi barang-barang elektronik seperti gadget. Namun sembilan bulan pertama di tahun 2015, transaksi tersebut

mengalami penurunan sebesar 18,9 persen disebabkan oleh rantai pasokan merah *(red supply chain)* (Bureau of Foreign Trade (Taiwan) n.d).

Penurunan ini juga terlihat dari sektor perdagangan Taiwan-Tiongkok. Dari tahun 2012-2014, total perdagangan kedua negara meningkat sekitar 9 persen (Mainland Affairs Council 2016). Bahkan, awal tahun 2015, Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar dari Taiwan senilai $86,7 miliar (Lee and Yin 2017). Secara statistik, angka tersebut jauh dari mitra-mitra lainnya misalnya Hong Kong($29,6) dan AS ($45,3). Dalam kurun waktu yang sama, Taiwan masuk ke dalam salah satu investor terbesar Tiongkok.

Tabel 2 Daftar Investor di Tiongkok tahun 2015

Peringkat	Negara	Total Investasi (persen)
1	Hong Kong	47,87%
5	Amerika Serikat	4,45%
7	Taiwan	3,60%

Sumber: Xie (2018).

Laporan dari *Taiwan Ministry of Economics And Mainland Affairs Council* 2015 (lihat tabel 2), perkembangan investasi Taiwan berkontribusi besar di Tiongkok dengan menyumbangkan sekitar 3,60 persen. Namun, eksistensi FDI Taiwan masih jauh dibandingkan Hong Kong yang mencapai angka 47,87 persen (Lovely and Huang 2018). Secara statistik, investasi Taiwan di Tiongkok dalam

sembilan bulan pertama tahun 2015 sebesar $7,3 miliar, turun 4,4 persen di tahun 2014 . Tren ini serupa dengan sektor perdagangan (Ministry of Economic Affairs 2014). Meskipun terjadi penurunan, angka-angka tersebut masih terbilang cukup stabil jika dibandingkan di periode pertama masa jabatan Ma (terutama di tahun 2009). Investasi Taiwan di Tiongkok pernah mengalami puncaknya pada tahun 2014 yang hampir menyentuh angka $14 miliar.

Pemerintah Tiongkok melakukan kemudahan bagi investor dari Taiwan untuk melakukan kerja sama perdagangan, salah satunya dengan menambah zona perdagangan bebas di Fujian (Invest Xiamen n.d). Menurut laporan dari *U.S – China Economic and Security Review Commission* tahun 2016, zona ini tidak memerlukan biaya tarif impor dan pemeriksaan terhadap barang impor (Rosier, O'Connor, and Cuevas 2016). Hal ini mempermudah barang-barang Taiwan masuk seperti produk kesehatan, kosmetik, medis hingga investasi asing lainnya (Ibid).

Integrasi kerja sama ekonomi antara Taiwan-Tiongkok diapresiasi oleh Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Apresiasi tersebut dihadirkan sejak hubungan Taiwan-Tiongkok terpecah di era Chen (2000-2008). Meskipun terdapat gejolak instabilitas sosial, Taiwan-Tiongkok dapat berkomunikasi dengan baik. Terbukti di tahun 2015, Taiwan dan Tiongkok bertemu secara diplomatik di Singapura (Phillips 2015). Pertemuan ini krusial bagi Tiongkok maupun Taiwan sejak berakhirnya Perang Sipil tahun 1949, kedua negara tidak pernah memiliki agenda kunjungan diplomatik. Tidak lama berselang, hubungan Taiwan-Tiongkok justru melemah di era Tsai Ing-wen.

2.1.2 Masa Pemerintahan Tsai Ing-wen dan Xi Jinping

Berbeda dengan Ma, orientasi ekonomi Tsai berbasis pengakuan politik. Penolakan terhadap Konsensus 1992 menyebabkan komunikasi SEF-ARATS terhenti sementara (Chung 2016). Hal ini juga terjadi pada level pemerintahan seperti Mainland Affairs Council (MAC) dan Taiwan Affairs Office (TAO) (Ibid). Di samping itu, Tsai menolak kerja sama mengenai CSSTA untuk dilanjutkan. Keterlibatan CSSTA hanya merusak keadaan domestik dan dijadikan alat bagi Tiongkok untuk mengintervensi Taiwan serta menutup eksistensi Taiwan dalam tatanan global (Rosier, O'Connor, and Cuevas 2016).

Tsai memperkenalkan orientasi ekonomi yang berbasis *New Southbound Policy* di tahun 2016 (Kennedy and Funaiole 2018). NSP bertujuan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dengan Tiongkok (Ibid). Terbukti, di tahun 2019, investasi Taiwan di Tiongkok menurun secara signifikan sebesar 51 persen menjadi $4,17 miliar (Yip 2020). Angka tersebut melanjutkan tren penurunan investasi dalam kurun 4 tahun belakang. Bahkan, produksi TSMC ke Tiongkok (seperti Huawei) mengalami penghambatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, TSMC memilih untuk membuka pasar secara global misalnya ke AS dan Jerman . Kedua, AS memberlakukan pengajuan lisensi yang menyebabkan suplai TSMC terhambat ke Tiongkok. Hal ini disebabkan beberapa manufaktur TSMC berasal dari AS seperti *Lam Research dan Applied Materials* (Klein 2020).

2.2 Perkembangan Hubungan Politik Keamanan-Militer Taiwan dan Tiongkok

2.2.1 Masa Pemerintahan Ma Ying-jeou dan Xi Jinping

Konsep satu Tiongkok yang tercantum di dalam PBB menyatakan secara resmi bahwa Taiwan berada di bawah daerah administratif Tiongkok. Resolusi PBB No.2758 tersebut berbunyi:

> *" […] decides to restore all its rights to the People's Republic of China and to recognize to the representatives of its Government as the only legitimate representatives of China to the United Nations, and to expel forthwith the representatives of Chiang Kai-shek from the place which they unlawfully occupy at the United Nations and in all the organizations related to it* ([...] Republik Rakyat Tiongkok diakui sebagai perwakilan dari pemerintah sebagai satu-satunya perwakilan Tiongkok yang sah untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan segera mengusir perwakilan dari Chiang Kai-shek dari tempat yang mereka tempati dan secara tidak sah di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan di semua organisasi yang terkait dengannya") (United Nations 1971).

Mengenai kebijakan tersebut, Ma sempat melakukan 'penolakan'. Secara definisi, Ma mengartikan konsep tersebut sebagai kebijakan yang membuat Taiwan berjalan mandiri (deLisle and Cabestan 2014). Dalam artian, Tiongkok tidak memiliki hak terhadap jalannya politik maupun ekonomi Taiwan. Namun definisi tersebut tidak sejalan dengan Tiongkok (Ibid). Menurut Xi, kebijakan satu

Tiongkok berarti Taiwan masih di bawah kedaulatan Tiongkok melalui asas satu negara dua sistem. Asas tersebut berfungsi untuk ‘mengatur’ jalannya politik maupun ekonomi Taiwan seperti Tiongkok lakukan dengan Hong Kong di bawah pemerintahan Carrie Lam. Kenyataannya, hubungan politik Taiwan-Tiongkok berjalan dengan baik. Terbukti, Ma dan Xi bertemu di Singapura pada tahun 2015. Meskipun tidak membicarakan mengenai aspek politik, pertemuan tersebut sangat berarti bagi kedua negara.

2.2.2 Masa Pemerintahan Tsai Ing-wen dan Xi Jinping

Berbeda dengan Ma, Tsai menolak keras adanya kebijakan satu negara dua sistem. Menurut Tsai, konsep tersebut semakin menyudutkan Taiwan dari dunia internasional. Tsai menambahkan bahwa konsep tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perdamaian dan demokrasi yang sudah dibangun oleh Taiwan sejak tahun 1990an (Subba 2016). Oleh karena itu, Tiongkok tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam politik maupun sirkulasi ekonomi Taiwan. Orientasi kebijakan yang liberal ala Tsai semakin jelas ketika Tsai menginginkan Taiwan berada dalam status yang ‘merdeka’ (Kuo 2020). Alasan tersebut dipertimbangkan melalui beberapa aspek seperti militer, ekonomi, bahkan pemilu yang dapat dijalankan oleh Taiwan secara mandiri.

Kebijakan Tsai yang progresif tersebut ditentang oleh pemerintah Tiongkok. Menurut Tiongkok, Taiwan mencoba untuk menyusun rencana dalam melakukan gerakan separatis. Hal ini tentunya menjadi ancaman bagi kedaulatan Tiongkok. Bahkan setelah Tsai terpilih dalam pemilu Taiwan di periode kedua,

pidatonya semakin tegas menyatakan posisi Taiwan. Tsai tidak menginginkan kedaulatan Taiwan bernasib seperti status Hong Kong:

> *"Here, I want to reiterate the words 'peace, parity, democracy, and dialogue'. We will not accept the Beijing authorities' use of 'one country, two systems' to downgrade Taiwan and undermine the cross-strait status quo. We stand fast by this principle,"* ("Di sini, saya ingin mengulangi kata-kata 'perdamaian, paritas, demokrasi, dan dialog'. Kami tidak akan menerima penggunaan 'satu negara, dua sistem' oleh otoritas Beijing untuk menurunkan derajat Taiwan dan merusak status quo lintas Selat. Kami berdiri teguh dengan prinsip ini.") (France24 2020).

Sikap Taiwan yang agresif terhadap penolakan tersebut membuat Tiongkok mengirim beberapa pasukan militer udara. Di tahun 2020, frekuensi *People's Liberation Army* (PLA) dan *bomber aircraft* bernavigasi di *Taiwan's Air Defense Identification Zone* (ADIZ) sebanyak 20 kali.

Tabel 3 Ringkasan Operasi PLA di Taiwan tahun 2020

Aktivitas PLA	Militer yang terlibat	Respon Taiwan
Masuk Selat Taiwan	(2) H-6 *bombers*	Peringatan melalui radio
	(8) J-16 *fighters*	Patroli udara

Masuk ADIZ	(4) J-11 *fighters*	Pertahanan misil udara
	(4) J-10 *fighters*	

Sumber: Ministry of National Defense, R.O.C (Taiwan) (2020)

Menurut Tiongkok, aksi dari gerakan separatis tersebut harus dibendung dengan dasar kesepakatan Konsensus 1992 dan prinsip satu negara dua sistem. Untuk itu, pengiriman angkatan militer tersebut, secara sah dapat dilakukan oleh Tiongkok. Operasi militer tersebut menimbulkan tensi antar kedua negara. Bahkan menjadi diskusi global hingga dapat melibatkan peran Amerika Serikat terhadap status Taiwan dan sikap Tiongkok.

2.3 Perkembangan Hubungan Ekonomi Taiwan dan Amerika Serikat

2.3.1 Masa Pemerintahan Ma Ying-jeou dan Barack Obama

Hubungan Taiwan-AS dalam sektor ekonomi berjalan secara signifikan seperti Taiwan-Tiongkok. Namun, di era Ma, posisi AS sebagai mitra dagang tidak lebih besar daripada Tiongkok-Taiwan. Berdasarkan data dari *United States Census Bureau,* angka perdagangan AS-Taiwan mencapai yang tertinggi pada tahun 2014 sebesar $67,4 miliar (U.S Census Bureau 2015). Data tersebut juga menunjukkan ada peningkatan sebesar 6 persen dari tahun ke tahun (Ibid). Bahkan di tahun tersebut, Taiwan memasuki mitra kesepuluh AS dengan dapat melewati mitra-mitra dengan ekonomi besar lainnya seperti India dan Arab Saudi. Tren positif tersebut terus ditunjukkan oleh kedua negara. Bahkan di sembilan bulan pertama di tahun

2015, AS menyumbangkan 11,7 persen dari total perdagangan Taiwan (Bureau of Foreign Trade (Taiwan) n.d).

Ekspor yang dilakukan terhadap AS terbilang masih beragam dibandingkan ekspor dari Taiwan ke Tiongkok. Awal tahun 2015, ekspor Taiwan mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 11,8 persen (Bureau of Foreign Trade (Taiwan) n.d). Sebagian besar dari ekspor tersebut didominasi oleh semikonduktor ($2,3 miliar) (Rosier, O'Connor, and Cuevas 2016). Namun, ekspor Taiwan ke AS juga diikuti oleh produk-produk lainnya seperti barang-barang pesawat ($1,3 miliar) (Ibid). Di samping itu, impor dari AS pada tahun 2015 berada pada angka $26,4 miliar yang telah berkontribusi sebesar 11,54 persen (Ibid).

Hubungan dagang AS-Taiwan difasilitasi melalui *Trade and Investment Framework Agreement* (TIFA) dari *the American Institute in Taiwan* (AIT) serta *the Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States* yang sudah ada sejak tahun 1994 (Glaser, Bush, and Green 2020). Meskipun terdapat tren positif secara statistik dagang, TIFA belum pernah berjalan sejak tahun 2007 hingga 2012 (Ibid). Faktor tersebut disebabkan oleh perdebatan mengenai pengiriman babi yang mengandung ractopamine dan beberapa bahan pakan umum. Namun, beberapa aturan sempat dicabut pada tahun 2013. TIFA berencana untuk diadakan pada April 2015, tetapi ditunda dengan alasan bahwa AS berfokus untuk menyelesaikan mengenai TPP (Ibid). Namun di akhir tahun 2015, TIFA diadakan dengan membahas mengenai beberapa agenda seperti hambatan dagang, investasi, hak kekayaan intelektual, hingga rencana Taiwan untuk masuk ke dalam TPP. Dalam pembahasan tersebut, TIFA tidak membicarakan mengenai impor babi yang sedang menjadi perdebatan politik domestik Taiwan.

2.3.2 Masa Pemerintahan Tsai Ing-wen dan Donald Trump

Tahun 2019, hubungan AS-Taiwan semakin meningkat. Di sektor perdagangan, Taiwan mampu mengungguli mitra-mitra strategis AS lainnya seperti Vietnam, Italia, dan Brasil dengan total dagang sebesar $85,5 miliar (U.S. Census Bureau 2019). Nilai tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang sebesar $76,1 miliar (Ibid). Di pertengahan tahun 2020, hubungan ekonomi AS-Taiwan kembali meningkat dengan ditandainya peringkat Taiwan yang masuk ke dalam 10 besar mitra AS. Saat itu, Taiwan dapat menyumbangkan sekitar 2,2 persen dari ekspor dan 2,6 persen dari impor AS (Hille and Williams 2020). Peningkatan tren tersebut juga diikuti oleh sektor investasi. Tahun 2017, investasi AS di Taiwan berada pada angka $17 miliar dan Taiwan ke AS senilai $8,1 miliar (Office of the U.S Trade Representative n.d). Kedekatan AS dan Taiwan di era Tsai juga semakin mengalami peningkatan setelah TSMC mengumumkan untuk membuka pabrik di Arizona, AS dengan dana proyek yang mencapai $12 miliar (Nellis and Holmes 2021).

Dengan adanya progresivitas kedekatan ekonomi, Trump tidak mengeluarkan kebijakan untuk memakai fasilitas dari TIFA. Hal ini didorong oleh beberapa faktor. Selain mengenai perdebatan impor babi, Trump lebih memilih untuk menyelesaikan masalah mengenai Perang Dagang dengan Tiongkok. Berhentinya TIFA, Trump memulai untuk membicarakan fasilitas komunikasi dagang yang lebih intens dengan cara *Bilateral Trade Agreement* (BTA) (Glaser, Bush, and Green 2020). Menurut pihak Taiwan, pembentukan BTA diperuntukan untuk membuka pasar dari Taiwan ke pasar internasional daripada harus bergantung dengan Tiongkok sepenuhnya. Salah satu agenda yang

dikomunikasikan adalah mengenai pengesahan terhadap impor babi ractopamine. Pada Agustus 2020, Tsai mengumumkan untuk mengizinkan adanya impor babi dari AS (Lin 2020). Kebijakan ini dilakukan untuk mendekatkan kerja sama ekonomi AS-Taiwan meskipun kebijakan ini ditentang oleh pihak oposisi yaitu KMT.

Untuk memperkuat jejak kerja sama ekonomi. AS mengeluarkan Undang-Undang (UU) *the Taipei International Protection and Enhancement Initiative* (TAIPEI) *Act of 2019* (Everington 2020). Peraturan tersebut tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik Taiwan dan negara mitra lainnya namun AS juga menjamin adanya hubungan ekonomi yang lebih kuat. Fakta tersebut dituliskan di dalam 3 pasal pada bagian "Perdagangan dan Hubungan Ekonomi dengan Taiwan":

> Pasal 1: *the United States and Taiwan have built a strong economic partnership, with the United States now Taiwan's second largest trading partner. and with Taiwan the 11th largest trading partner of the United States and a key destination for United States agricultural exports* (Amerika Serikat dan Taiwan telah membangun kemitraan ekonomi yang kuat, dengan Amerika Serikat kini menjadi mitra dagang terbesar kedua. Taiwan dan dengan Taiwan menjadi mitra dagang terbesar ke-11 di Amerika Serikat dan tujuan utama ekspor pertanian Amerika Serikat.) (Congress.gov n.d).

> Pasal 2: *Strong United States-Taiwan economic relations have been a positive factor in stimulating economic growth and job creation for the people of both the United States and Taiwan* (Hubungan ekonomi Amerika Serikat-Taiwan yang kuat telah menjadi faktor positif dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Amerika Serikat dan Taiwan) (Congress.gov n.d).

Pasal 3: *The United States Trade Representative should consult with Congress on opportunities for further strengthening bilateral trade and economic relations between the United States and Taiwan* (Perwakilan Dagang Amerika Serikat harus berkonsultasi dengan Kongres tentang peluang untuk lebih memperkuat perdagangan bilateral dan hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan Taiwan) (Congress.gov n.d).

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian jangka panjang selama Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Chiang, profesor di *National Chengchi University*, Taiwan berargumen bahwa UU yang disahkan oleh AS dipercaya untuk menekan Tiongkok secara ekonomi terhadap relasinya dengan Taiwan (Larus and Robbins 2020).

2.4 Perkembangan Hubungan Politik Keamanan-Militer Taiwan dan Amerika Serikat

2.4.1 Masa Pemerintahan Ma Ying-jeou dan Barack Obama

Dalam aspek keamanan-militer, hubungan AS-Taiwan berjalan selaras dengan *the Taiwan Relations Act* (TRA). Secara definisi, TRA merupakan peraturan yang ditandatangani oleh AS-Tiongkok tahun 1979 dengan tujuan bahwa AS memiliki hak untuk bertransaksi militer dengan Taiwan demi menjadi stabilitas kawasan. Hak tersebut dipakai AS hingga masa kepemimpinan Barack Obama.

Namun, AS-Taiwan tidak melakukan transaksi militer dalam jangka waktu 3 tahun (2012-2014). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi konflik dengan Tiongkok namun tetap menjaga stabilitas kawasan Taiwan.

Hubungan baik Ma-Xi beserta orientasi Obama yang mendukung adanya kebijakan satu Tiongkok membuat relasi ketiga negara rendah konflik. Transaksi militer AS-Taiwan baru berjalan di tahun 2015. Obama menyetujui dana militer sebesar $1,7 miliar (Glaser, Bush, and Green 2020). Di tahun tersebut, Taiwan menyisihkan 10,5 persen untuk dialokasikan kepada sektor militer.

Tabel 4 *Arms Sales* Amerika Serikat ke Taiwan Tahun 2015

Tahun	Produk Militer ke Taiwan	Dana Militer
2015	(208) *Javelin Guided Missiles*	$1,7 miliar
	(36) *Assault Amphibious Vehicles* (AAVs)	
	Taiwan Advanced Tactical Data Link System and Link-11 Integration	
	Follow-on-life cycle support to maintain the Multifuncional and Information Distribution System Low Volume Terminals and Joint Tactical-Information Distribution System (JTIDS)	
	Sale, refurbishment, and upgrade of (2) Oliver Hazard Perry-class Frigates (FFG-7) and associated weapons systems	
	(13) MK 15 Phalanx Block 1B Baseline 2 Close-in Weapons System (CIWS) Guns, upgrade kits, ammunition, and support.	
	(769) TOW 2B Aero, Radio	

	Frequency (RF) Missiles (BGM-71 FSeries)	
	(250) Block I-92F MANPAD Stinger Missiles	

Sumber: Glaser, Bush, and Green (2020).

Paket senjata militer (lihat tabel 4) yang canggih adalah *block I-92 F MANPAD Stinger Missiles*. Senjata ini diperkirakan menghabiskan dana sebesar $217 miliar (Defense Security Cooperation Agency n.d). Dibuat di perusahaan *Raytheon Missile Systems*, AS, produk ini dapat melindungi sistem pertahanan udara Taiwan. Di samping hubungan militer, kedua negara juga pernah melakukan pertemuan kabinet. Pada April 2014, AS diwakili oleh Gina McCarthy sebagai *Administrator, Environmental Protection Agency* (US Environmental Protection Agency 2021).

2.4.2 Masa Pemerintahan Tsai Ing-wen dan Donald Trump

Tsai melakukan manuver dalam mengubah kebijakan luar negeri Taiwan terhadap AS. Bergantung secara besar dengan pasar global juga berdampak pada pembelian alat-alat militer AS. Manuver tersebut direspon oleh Tiongkok dengan operasi militer di Selat Taiwan (lihat tabel 3). Namun, perubahan sikap tersebut didukung oleh Trump. Pada awal menduduki parlemen, Tsai secara langsung menghubungi Trump dengan tujuan mengucapkan selamat atas kemenangan pemilu di AS. Namun, terdapat faktor lain dari komunikasi Tsai-Trump (South China Morning Post 2016). Alex Huang, Juru Bicara Tsai, menekankan adanya pembicaraan mengenai beberapa aspek penting yang salah satunya mengenai keamanan nasional (Ibid). Meskipun AS tidak mengakui Taiwan sebagai negara

yang berdaulat, namun melalui TRA, transaksi yang dilakukan oleh Trump berbeda jauh.

Tabel 5 Penjualan Alat-Alat Militer ke Taiwan di Era Donald Trump

Tahun	Paket Militer	Anggaran Militer
2017	*Surveillance Radar Program (SRP) Operations and Maintenance support* *(50) AGM-88B High-speed Anti-Radiation Missiles (HARMs) and (10) AGM-88B Training HARMs* *(16) Standard Missile-2 (SM-2) Block IIIA All-Up Rounds (AUR) and components* *(46) MK 48 Mod 6AT Heavyweight Torpedoes (HWT) and support* *(168) MK 54 Lightweight Torpedo (LWT) Conversion Kits* *(56) AGM-154C Joint-Standoff JSOW Air-to-Ground Missiles* *AN/SLQ-32 (V) 3 Electronic Warfare Systems in support of four (4) ex-KIDD Class (now KE ELUNG Class) destroyers*	$1,4
2018	*Blanket order requisitions for stock replenishment supply of standard spare parts, repair/replace of spare parts in support of the F-16, C-130,F-5,IDF, and all other aircraft system and subsystems*	$0,3
2019	*Continuation of a pilot training program and/logistics support for F-16 aircraft* *(108) M12T Abrams Tanks and related equipment and support* *(250) Block I-92F MANPAD Stinger missiles, (4) Block I-92F MANPAD Stinger Fly-to-Buy missiles and related equipment and support* *(66) F-16C/D Block 70 aircraft and related equipment*	$10,7

10/21/20	*(11) High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) M142 Launchers* *(64) Army Tactical Missile Systems (ATACMS) M57 Unitary Missiles* *(7) M1152Al High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (HMMWVs)* *(11) M240B Machine Guns, 7.62MM* *(17) International Field Artillery Tactical Data Systems (IFATDS)*	$0,4
10/21/20	*(135) AGM-84H Standoff Land Attack Missile Expanded Response (SLAM-ER) Missiles* *(4) ATM-84H SLAM-ER Telemetry Missiles* *(12) CATM-84H Captive Air Training Missiles (CATM)*	$1,0
10/21/20	*(6) MS-110 Recce Pods and related equipment* *(3) Transportable Ground Stations* *(1) Fixed Ground Stations*	$0,4
10/26/20	*(100) Harpoon Coastal Defense Systems (HCDS) Consisting of up to (400) RGM-84 L-4 Harpoon Block II Surface Launched Missiles and related equipment* *(4) RTM-84L-4 Harpoon Block II Exercise Missiles*	$2,4

Sumber: Defense Security Cooperation Agency (n.d)

Dari beberapa pembelian persenjataan tersebut, Taiwan memiliki dana khusus yang diperuntukan untuk membeli senjata tingkat tinggi seperti F-16. Tahun 2019 (lihat tabel 5), AS sepakat untuk mengirimkan pesawat tempur F-16 senilai $8 juta. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertahanan AS terhadap serangan Tiongkok melalui jalur udara (ADIZ) (Air University 2017).

Melalui suplai senjata yang masif dari AS, Taiwan memberanikan diri untuk melakukan beberapa strategi militer dalam melawan Tiongkok. Tahun 2017,

Taiwan mengimplementasikan strategi militer bernama *the Overall Defense Concept* (ODC) (Thompson 2018). Strategi ini berfokus pada jarak 100 km dari garis pantai Taiwan dengan memanfaatkan ranjau darat, missile, hingga pergerakan pertahanan udara (Ibid).

Kebijakan yang masif juga ditunjukan oleh Trump setelah meloloskan *Taiwan Travel Act 2018* (US-China Institute 2018). UU tersebut menekankan bahwa hubungan Taiwan-AS harus diperkuat dengan mengadakan kunjungan negara. AS juga menekankan untuk memberikan kesempatan bagi seluruh kabinet Taiwan berkunjung ke AS.

2.5 Hubungan AS - Tiongkok yang Berdampak Terhadap Posisi Taiwan

Kebijakan dan posisi Taiwan di kawasan tidak hanya dipengaruhi oleh alasan domestik. Namun, kebijakan luar negeri Taiwan dipengaruhi persepsi ataupun hubungan AS-Tiongkok. Dari kurun waktu 2012-2020, AS mengalami perubahan kepemimpinan seperti dari Barack Obama hingga Donald Trump. Namun, Tiongkok hanya dipimpin oleh pemimpin yang otoriter, Xi Jinping. Transisi kekuasaan di AS mempengaruhi persepsi AS terhadap Tiongkok, hingga berdampak terhadap Taiwan. Misalnya, hubungan Obama-Xi maupun Trump-Xi.

Periode Barack Obama tahun 2012 berorientasi kepada Timur Tengah dan Eropa. Menurut AS, kedua kawasan tersebut merupakan yang krusial dibandingkan Taiwan. Namun, hal itu tidak menjustifikasi bahwa AS kehilangan ketertarikannya terhadap Taiwan. Kebijakan terhadap Taiwan dimulai melalui komunikasi AS dan Xi mengenai kebijakan satu Tiongkok. Obama menggunakan kebijakan luar negeri yang berasaskan *strategy ambiguity*. Konsep tersebut diimplementasikan melalui

pivot of Asia yang berarti menjaga stabilitas Asia dengan cara berhubungan baik dengan Tiongkok maupun Taiwan (Widmaier 2014). Melalui pertemuan Obama dan Xi di akhir tahun 2015, Obama berkomitmen untuk mendukung Taiwan yang berlandaskan *Six Assurances* dan *Three Communiques*:

> *"I reiterated my strong commitment as well to our 'one China' policy based on the Three Joint Communiques and the Taiwan Relations Act"* ("Saya menegaskan kembali komitmen kuat saya juga untuk kebijakan 'satu China' kami berdasarkan *Three Joint Communiques* dan *the Taiwan Relations Act*") (Lowther 2015).

Relasi hubungan Obama-Xi selaras dengan prinsip-prinsip di dalam satu Tiongkok 1979. Hal ini terjadi berdasarkan data militer (lihat tabel 4) yang menunjukan bahwa transaksi AS terhadap Taiwan tidak terlalu masif. Di samping itu, Obama mencoba untuk menggunakan pendekatan renik. Dalam artian, AS memiliki hubungan dekat dengan Tiongkok sekaligus menjaga stabilitas Taiwan.

Bahkan kedekatan tersebut direspon oleh Tiongkok. Xi mempromosikan relasi negara-negara kuat (AS dan Tiongkok) dalam bentuk tidak ada konflik maupun konfrontasi serta adanya kerja sama yang saling menghormati *(mutual respect)*. Sejak Xi Jinping menjadi petinggi Tiongkok, AS dan Tiongkok sudah bertemu sebanyak 11 kali. Pertemuan tersebut menandai meningkatnya komunikasi antar kedua negara mengenai Taiwan dan wilayah administratif Tiongkok lainnya. Adapun beberapa pertemuan AS-Tiongkok dimulai dari Sunnylands (AS), Yingtai (Tiongkok), hingga konferensi tingkat tinggi lainnya (White House 2016).

Berdasarkan data dari *the United States Census Bureau*, hubungan AS-Tiongkok secara ekonomi meningkat. Di tahun 2015, total perdagangan kedua

negara mencapai $599 miliar (Census Bureau n.d). Secara statistik, angka tersebut meningkat tajam sejak 2012 yang hanya $536,1 miliar (Ibid). Meskipun hubungan Obama maupun Xi tidak terlalu intensif karena faktor perbedaan fokus dari Obama, hal ini menunjukan kedua negara berkomitmen untuk melanjutkan prinsip-prinsip yang sejak dulu sudah tercipta.

Orientasi kebijakan luar negeri AS maupun Tiongkok tidak serupa dengan pemerintahan Trump. Melalui slogan '*American First'*, Trump lebih fokus terhadap aspek ekonomi. Dalam skala internasional, Trump memutuskan untuk keluar secara mandiri dari *Trans-Pacific Partnership* (TPP) yang sudah dibangun oleh Obama untuk mengimbangi dominasi Tiongkok di Asia (AEDE 2018). Akhir 2016, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe berargumen bahwa langkah tersebut dipercaya sebagai salah satu yang membuat perdagangan internasional tidak dapat terkoordinasi dengan baik (Malik 2018).

Trump memberlakukan kenaikan tarif terhadap barang impor Tiongkok yang masuk ke AS. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan seperti melihat status perdagangan AS ke Tiongkok mengalami defisit sedangkan Tiongkok mengalami surplus. Trump berargumen bahwa Tiongkok tidak memiliki kapasitas dalam melakukan kerja sama dagang yang terbuka ataupun transparan. Di samping itu, Trump juga beranggapan perilaku yang dilakukan oleh Tiongkok tidak selaras dengan peraturan perdagangan bebas. Objektifikasi ini melahirkan Perang Dagang AS-Tiongkok. Kenaikan tarif impor 15 persen dari AS direspon secara langsung oleh Tiongkok. Pemerintah Tiongkok meningkatkan tarif sebesar 5 persen hingga 25 persen (Mullen and Bown 2022). Dalam tensi tersebut, Trump beranggapan bahwa Tiongkok merupakan 'musuh' AS.

Tensi tersebut juga berakibat pada persepsi Trump terhadap posisi Taiwan. Berbeda dengan *pivot of Asia*, Trump justru meloloskan *the Asia Reassurance Initiative Act* (ARIA) yang berguna untuk menandingi dominasi Tiongkok di Asia Timur. Program ini digelontorkan oleh AS sebesar $1,5 miliar untuk berkontribusi dalam pembangunan di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Taiwan (Congress.gov n.d).

Pada April 2017, Trump-Xi melakukan pertemuan diplomatik di Mar-a-Lago, Florida (Nakamura 2017). Di pertemuan tersebut, isu Taiwan menjadi agenda pembahasan yang minor. Dalam artian, pertemuan kedua negara tersebut tidak secara keseluruhan membahas mengenai masalah ataupun status Taiwan (Ibid). Juru Bicara Menteri Luar Negeri AS, Mark Toner menegaskan bahwa AS memandang hubungan kerja sama dengan Taiwan berbasis mengenai *Six Assurances* dan prinsip satu Tiongkok (Ibid). Namun, pembicaraan tersebut berbanding terbalik ketika AS-Tiongkok mengalami tensi ekonomi maupun politik. Sehingga, dalam beberapa kali kesempatan, Trump sempat meloloskan beberapa UU krusial yang berdampak pada hubungan AS-Taiwan meningkat. Peningkatan kerja sama tersebut harus dibayar mahal dengan serangan militer yang dilakukan oleh Tiongkok ke perbatasan Taiwan.

BAB III

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Kebijakan Luar Negeri Taiwan Terhadap *China-Oriented* ke *the United States-Oriented* Ditinjau dari Perspektif *Decision Making*

Bab II sudah menjelaskan mengenai hubungan Taiwan, AS, Tiongkok secara komprehensif dari dua bidang yaitu ekonomi dan politik keamanan-militer. Dalam bagian tersebut juga sudah menjelaskan mengenai hubungan AS-Tiongkok yang berdampak terhadap status dari Taiwan. Maka daripada itu, untuk melanjutkan penelitian ini, bab III akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok ke AS. Namun, untuk menganalisis bab ini, penulis menggunakan teori *decision making* dari William D. Coplin (lihat bab I).

Idealnya, Coplin menekankan tiga faktor utama untuk menilai kebijakan luar negeri negara seperti faktor internal, eksternal, dan kapabilitas militer dan ekonomi. Namun, dalam studi kasus Taiwan, penulis hanya menggunakan dua aspek yaitu internal dan eksternal. Aspek-aspek tersebut akan diperkuat dengan komponen yang berpengaruh secara besar dalam politik Taiwan.

Pada faktor internal, penulis menekankan terhadap adanya protes domestik berupa *sunflower movement*. Gerakan tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri secara langsung, tetapi posisinya di pemilu tahun 2016, menentukan kemenangan DPP. Selain itu, adanya basis dasar dari partai DPPyang lebih condong ke liberal dibandingkan KMT yang konservatif.

Pada faktor eksternal, penulis akan menganalisis mengenai sistem internasional yang ditentang oleh DPP. Sistem ataupun prinsip yang ditentang

tersebut berupa kebijakan satu Tiongkok dan satu negara dua sistem. Dilain hal, penulis juga menganalisis mengenai dampak kemenangan Donald Trump dalam pemilu AS yang mengubah wajah politik AS terhadap Taiwan.

Tabel 6 Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Perubahan Kebijakan Luar Negeri Taiwan

Sub-variabel	Faktor Internal	Sub-variabel	Faktor Eksternal
Opini Publik	Implikasi kebijakan luar negeri Taiwan yang condong ke arah Tiongkok menimbulkan *Sunflower Movement*	Politik Internasional	Penolakan satu negara dua sistem dan satu Tiongkok
Politik Domestik	Pengaruh ideologi DPP yang berorientasi ke Amerika Serikat	Politik Internasional	Kemenangan Donald Trump dalam Pemilu AS berdampak ke Taiwan

3.1 Faktor Internal

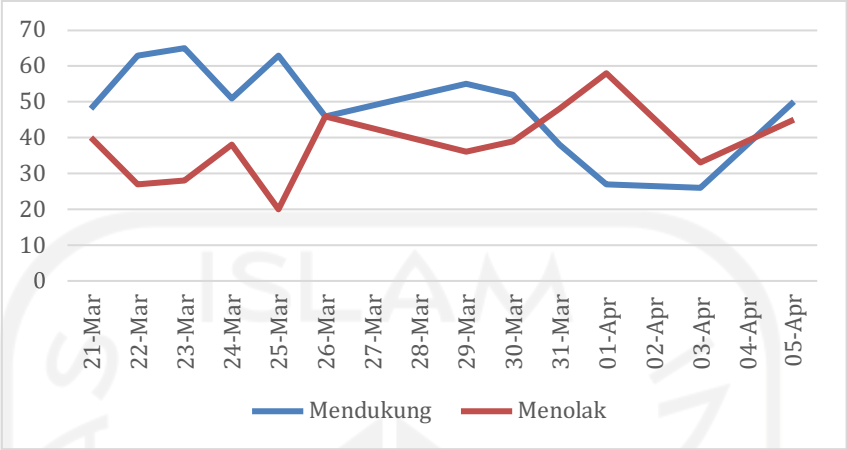
3.1.1 Opini Publik: Implikasi Kebijakan Luar Negeri Taiwan yang Condong Ke Arah Tiongkok Menimbulkan *Sunflower Movement*

Ma Ying-jeou (KMT) mendorong kedekatan kerja sama Tiongkok dan Taiwan melalui hubungan ekonomi. Hal ini menandai hubungan Tiongkok-Taiwan dalam menjaga stabilitas kawasan. Langkah yang dilakukan oleh Ma terbilang cukup agresif dibanding pada periode pertama (2008-2012). Namun, akar kerja sama ekonomi antara Taiwan-Tiongkok berada pada tahun 2010. Pada saat itu, ARATS maupun SEF mengadakan pertemuan untuk membahas ECFA. Meskipun telah disepakati, ECFA memiliki cabang untuk mendorong kerja sama yang lebih spesifik yaitu CSSTA.

Tahun 2013, CSSTA telah ditandatangani oleh ARATS, Chen Deming dan SEF, Lin Join Sane (Tsai and Liu 2017). Dalam perjanjian tersebut, Taiwan-Tiongkok sepakat akan membuka pasar untuk memperluas bisnis. Secara konteks, Tiongkok berencana untuk membuka 80 segmen pasar dan Taiwan berencana meliberalisasi 64 industri ke Tiongkok (Ibid). Melalui CSSTA, Tiongkok-Taiwan juga bersepakat akan melakukan transparansi dagang seperti layanan riset pasar, telekomunikasi, pertanahan pengangkutan jasa kurir hingga kuota impor. Di samping itu, CSSTA juga akan memperkuat ekonomi Taiwan melalui layanan jasa yang sudah berkontribusi sebesar 70 persen dari total GDP (Department of Statistics n.d).

Namun ketika CSSTA dibawa ke dalam legislatif yuan, perjanjian tersebut mendapatkan protes. Masyarakat Taiwan melakukan protes ke legislatif yuan dengan tujuan agar penandatangan CSSTA ditunda. Demonstrasi tersebut dikenal dengan *sunflower movement* tahun 2014 (He 2019). Didominasi oleh pelajar, *sunflower movement* berjalan selama 24 hari (18 April-10 Mei 2014) (Hsiao and Wan 2017). Terhitung pada 30 Maret, sebanyak 500.000 massa berkumpul di Ketagalan Boulevard, Kota Taipei hingga menduduki legislatif yuan (Ibid). Protes ini didukung secara besar oleh publik Taiwan.

Grafik 1 Dukungan Publik terhadap Okupasi di Legislatif Taiwan Tahun 2014



Sumber: TVBS Poll Center (2014).

Grafik tersebut menunjukan bahwa ada sekitar 53,3 persen masyarakat Taiwan yang mendukung penundaan terhadap CSSTA di tingkat legislatif (Hsiao and Wan 2017). Dari demonstrasi tersebut terdapat dua permintaan ataupun tujuan protes. Pertama, CSSTA dapat menekan perusahaan kecil Taiwan sehingga tidak dapat berkembang dan dirugikan. Kedua, tinggalkan ketergantungan Taiwan terhadap Tiongkok. Protes ini terlihat dengan basis data yang konkret. Pada level ekonomi, ARATS dan SEF telah sering melakukan pertemuan dalam kurun waktu 4 tahun belakang (lihat tabel 1).

Menurut data dari *Taiwan Directorate-General of Budget*, tingkat pengangguran di Taiwan meningkat terutama dari generasi muda. Pada periode Ma, pelajar yang baru lulus dari pendidikan justru memiliki tingkat pengangguran yang tinggi yaitu sebesar 5-6 persen (Rosier, O'Connor, and Cuevas 2016). Dari data tersebut justru membuktikan bahwa ketergantungan Taiwan dengan Tiongkok membuat kondisi sosial di Taiwan menjadi buruk. Di level nasional,

ketergantungan dan instabilitas sosial tersebut juga membuat pertumbuhan ekonomi Taiwan di tahun 2014 hanya berada pada angka 2 persen (Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, ROC n.d).

Merespon peristiwa tersebut, kandidat presiden Taiwan tahun 2016, Tsai Ing-wen mengungkapkan respon dengan menawarkan kebijakan terbuka. Dalam pidatonya tahun 2015 dalam forum *Center for Strategic and International Studies* (CSIS):

> *"For most Taiwanese, the state of our economy is a source of great distress as it has stagnated for some time and has lost momentum for growth. Globalization and China's rise as the world's factory have affected Taiwan's efficiency-driven model of economic growth. This has gradually resulted in a widening income gap, outsourcing of job opportunities, and stagnating salaries*"("Bagi kebanyakan orang Taiwan, keadaan ekonomi kita adalah sumber kesulitan besar karena telah mengalami stagnasi selama beberapa waktu dan kehilangan momentum untuk pertumbuhan. Globalisasi dan kebangkitan China sebagai pabrik dunia telah memengaruhi model pertumbuhan ekonomi yang digerakan oleh efisiensi di Taiwan. Hal ini berangsur-angsur mengakibatkan kesenjangan pendapatan yang semakin lebar, *outsourcing* kesempatan kerja, dan gaji yang stagnan") (Rosier, O'Connor, and Cuevas 2016).

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa transisi politik atau kekuasaan di Taiwan akan mengubah kebijakan yang sudah pernah terjadi di era Ma.

Di pemilu Taiwan 2016, DPP yang diwakili oleh Tsai Ing-wen dan Chen Chien-jen memenangkan pemilihan dengan dapat mengamankan 56,1 persen serta DPP berhasil mengisi 68 kursi legislatif dari 113 kursi yang tersedia (U.S.-China Economic and Security Review Commission 2016). Kemenangan Tsai terbilang menarik sebab pemilu tersebut terjadi di dalam ketegangan domestik meskipun sudah berakhir pada tahun 2014. Cheng (2015) berargumen bahwa kemenangan dari Tsai direncanakan secara sempurna melalui dukungan dari *sunflower movement* (Cheng 2015). Keberhasilan gerakan tersebut dalam menunda CSSTA menghasilkan tiga partai baru dalam politik Taiwan. Salah satunya adalah *New Power Party* (NPP) (He 2019). Freddy Lim, Lin Feng-cheng, dan Chiu Hsien-chih yang merupakan aktor-aktor penting dalam *sunflower movement*, mendirikan NPP di tahun 2015 dengan tujuan untuk beroposisi dengan KMT (Taiwan News 2020). Sebagai partai yang baru dan berorientasi paham-paham liberal, NPP memutuskan untuk bergabung ke dalam DPP di pemilu 2016. Keputusan ini menjadi 'batu pijakan' bagi DPP untuk melangkah lebih jauh lagi dengan memanfaatkan generasi muda hasil dari *sunflower movement*. Mengikuti kemenangan DPP, NPP berhasil memasuki 5 kursi legislatif dari 113 kursi (The News Lens 2016). Menurut TVBS Poll Centre tahun 2016, sekitar 62 persen suara DPP dalam pemilu di dukung oleh remaja yang berusia 20-29 tahun (He 2019).

Selama periode kampanye, kolaborasi DPP dan NPP menerapkan slogan *"Taiwanese Consciousness"* dengan menggunakan peran dari Freddy Lim yang merupakan anggota dari band metal terbesar di Taiwan, Chthonic untuk mengumpulkan suara (Fell 2016). Wang (2016) berargumen agenda NPP-DPP akan

memberikan harapan remaja di Taiwan setelah kejadian demonstrasi CSSTA (Hsieh 2016).

Di bawah kekuasaan Tsai, memperbaiki orientasi ekonomi dari bayang-bayang Tiongkok menjadi kebijakan utama. Tsai menjalankan *the efficiency-driven model* dalam kebijakan ekonomi Taiwan (Rosier, O'Connor, and Cuevas 2016). Kebijakan tersebut mendorong Taiwan agar tidak bergantung dengan Tiongkok terlalu luas dengan cara memanfaatkan pasar global seperti AS. Stimulus adanya langkah tersebut dimanfaatkan Tsai untuk mendorong ekonomi Taiwan, terutama domestik. Tsai memperkenalkan *the New Southbound Policy* (NSP) untuk memperkuat jaringan ekonomi Taiwan kepada negara ASEAN, India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Australia, dan New Zealand. Di tahun 2019, perdagangan Taiwan dengan negara NSP mencapai $111 miliar (Yip 2020).

Diversifikasi konsentrasi ekonomi juga meningkatkan 3,3 persen GDP Taiwan di tahun 2016 yang sebelumnya hanya sekitar 2 persen (Rosier, O'Connor, and Cuevas 2016). AS, yang menjadi tujuan dari orientasi Tsai didukung oleh kalangan remaja di Taiwan. Ekspor Taiwan yang meningkat 17,2 persen di tahun 2019, diiringi oleh survei dari *Pew Research* 2019. Menurut data tersebut, sebanyak 85 persen suara kalangan remaja di Taiwan mendukung kerja sama ekonomi AS-Taiwan (Pew Research 2020). Kalangan remaja tersebut bermayoritaskan umur 18-29 tahun. Data tersebut juga mengindikasikan bahwa generasi muda di Taiwan merasa diuntungkan dengan keterbukaan relasi Taiwan terhadap AS. Menurut data dari *National Statistic of Taiwan*, jika dibandingkan pekerja buruh dalam rentan 20-24 tahun pada Desember 2015-Desember 2019 meningkat partisipasinya sebesar 6 persen (National Statistics, Republic of China (Taiwan) n.d).

3.1.2 Politik Domestik: Pengaruh Ideologi Partai DPP yang Berorientasi ke Amerika Serikat

Kemenangan DPP dalam pemilu Taiwan 2016 mengakibatkan Taiwan memiliki hubungan buruk dengan Tiongkok. Tidak hanya dukungan NPP, penyebab lainnya adalah ideologi dari DPP. Lahirnya DPP tahun 1970an menjadi landasan dari misi Tsai Ing-wen dalam pemilu 2016 dan 2020. Sejak KMT kalah Perang Sipil tahun 1949, KMT menjadi partai tunggal yang menguasai politik domestik Taiwan (Eastman 1986). Orientasi kebijakan yang dimiliki oleh KMT cenderung konservatif ataupun condong terhadap Tiongkok. Misalnya di era Ma, KMT telah beberapa kali membangun komunikasi dengan pemerintah Tiongkok. Bahkan menandatangani CSSTA yang merupakan cabang dari ECFA. Hal ini menandakan bahwa Tiongkok menjadi mitra utama dalam sektor ekonomi.

Untuk menentukan orientasi politik DPP, diperlukan menilik sejarah dari pendirian partai tersebut. Di tahun 1970an, KMT pernah memberlakukan kebijakan yang membatasi mobilitas masyarakat Taiwan seperti membatasi dan mengontrol media massa (Klöter 2004). KMT juga pernah memberlakukan kebijakan dalam dunia pendidikan untuk mempelajari tentang sejarah Tiongkok, tetapi bukan mengenai Taiwan (Ibid). Para pelajar juga didorong secara paksa untuk menghormati jasa dari Chiang Kai-shek dalam kampanye KMT (Ibid).

Di tengah pembatasan tersebut, muncul beberapa aktivis oposisi yang mencoba melawan paham-paham Tiongkok menurut KMT. Kelompok-kelompok tersebut bernama *Tang-wai* atau kelompok diluar KMT. Pendirian kelompok oposisi didasari *self-identification* yang merepresentasikan kalangan Taiwan asli

bukan Tiongkok. Salah satu slogan yang dibuat kelompok ini adalah Gerakan Taiwan Merdeka (Tanasaldy 2017).

Setelah AS-Tiongkok sepakat membangun hubungan diplomatik tahun 1979, kelompok aktivis tersebut membangun kendaraan partai politik bernama DPP tahun 1986 (Ibid). Kelompok ini berkembang dan menjadi pihak oposisi dari KMT dengan empat tuntutan utama yang salah satu diantaranya adalah pemutusan hubungan baik dengan Tiongkok dengan mencari mitra lainnya seperti AS maupun Eropa (Klöter 2004). Polemik mengenai masalah identitas pernah dipakai oleh KMT dalam kampanye pemilu. Namun, pengertian mengenai identitas tersebut berbeda. Misalnya, KMT tetap mendukung kebijakan satu Tiongkok dua sistem yang diformulasikan oleh Tiongkok. Dalam mendeklarasikan DPP hingga Tsai, DPP menggunakan bahasa Hakka yang merupakan asli Taiwan daripada menggunakan bahasa Mandarin (Taiwan News 2017). Fakta ini membuktikan bahwa DPP membawa isu identitas dan masalah Tiongkok menjadi parameter kebijakan yang utama.

Sekitar tahun 1980an, menurut penelitian dari Hsu (2014), identitas yang mengaku sebagai etnis Tionghoa terdapat penurunan (Hsu 2014). Data tersebut menunjukkan terdapat 14,8 persen beretnis Taiwan. Hal ini berlanjut hingga periode Ma dan Tsai. *National Chengchi University* melakukan survei pada Desember 2012-Desember 2020 mengenai konfirmasi identitas Taiwan. Hasil dari survei tersebut mengalami peningkatan dari 54,3 persen dan 64,3 persen (Taipei Times 2021).

Historis DPP mengenai politik domestik maupun internasional terlihat dari pemilu 2016-2020 ketika berhasil merebut periode ke 2 dalam masa jabatan

presiden. Penolakan untuk berkomunikasi dengan Tiongkok dan membuka hubungan dengan AS, terlihat saat Tsai melakukan pidato tahun 2016. Di samping itu, DPP juga menekankan mengenai kebebasan hak individu, demokrasi, dan perdamaian:

> *"The new government must usher in a new beginning for Taiwan's democratic politics, and give our young people a healthy and diverse democracy. That is the true meaning of our work on transitional justice."*(" Pemerintah baru harus mengantarkan awal baru bagi politik demokrasi Taiwan, dan memberi generasi muda kita demokrasi yang sehat dan beragam. Itulah arti sebenarnya dari pekerjaan kami tentang keadilan transisional.") (Office of the President Republic of China(Taiwan) 2016).

Ide-ide liberal dari DPP sudah terlihat tahun 2016 ketika Tsai mengesahkan pernikahan sesama jenis di Taiwan.

Progresivitas dari DPP mengenai kedekatannya dengan AS direspon positif oleh masyarakat Taiwan. Survei yang dilakukan oleh *Pew Research* tahun 2019 menunjukkan 79 persen dari masyarakat mendukung Taiwan untuk menjalin kerja sama di bidang politik (Pew Research 2020). Persentase tersebut diperkuat dengan suara sebesar 85 persen yang mendukung untuk Taiwan kerja sama dengan AS dalam bidang ekonomi (Ibid). Di lain hal, hanya ada 35 persen masyarakatTaiwan yang cenderung untuk memilih pemerintah Taiwan membuka kerja sama dengan Tiongkok (Ibid).

Data tersebut juga berimplikasi terhadap kemenangan Tsai (DPP) pada pemilu 2020 dengan perolehan angka sebesar 57 persen dari pesaing politiknya dari KMT, Han Kuo-yu (Lu 2020). Melalui kebijakan yang serupa, Tsai tetap tidak ingin untuk membangun hubungan politik maupun ekonomi dengan Tiongkok. Dalam pidatonya, Tsai mengungkapkan:

> *"Taiwan is showing the world how much we cherish our free democratic way of life and how much we cherish our nation. Peace means that China must abandon threats of force against Taiwan. I also hope that the Beijing authorities understand that democratic Taiwan, and our democratically elected government, will not concede to threats and intimidation."* ("Taiwan menunjukkan kepada dunia betapa kami menghargai cara hidup demokratis kami yang bebas dan betapa kami menghargai negara kami. Perdamaian berarti bahwa China harus meninggalkan ancaman kekerasan terhadap Taiwan. Saya juga berharap pihak berwenang Beijing memahami bahwa Taiwan yang demokratis, dan pemerintah kita yang terpilih secara demokratis, tidak akan menyerah pada ancaman dan intimidasi.") (Ibid).

Citra buruk Tiongkok di Taiwan menjadi salah satu alasan mengenai hilangnya suara Tiongkok dalam persepsi sebagian masyarakat Taiwan. Setelah beberapa tahun di era Ma, kebijakan yang dilakukan oleh Tiongkok cenderung untuk mengintervensi domestik Taiwan. Fakta tersebut berakibat pada kerugian yang dialami oleh Taiwan dari aspek ekonomi.

Kontestasi DPP dan KMT di Taiwan sebagai partai besar memperkuat argumen bahwa wajar politik luar negeri Taiwan berlandaskan historis yang berimplikasi pada era modern. KMT yang akan cenderung kepada Tiongkok sedangkan DPP akan selalu menjadi oposisi di legislatif yuan untuk menentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KMT. Maka daripada itu, DPP memberikan kebijakan luar negeri yang berbeda dengan KMT serta ketika DPP memegang kekuasaan di parlemen, Tiongkok akan terus menjadi musuh.

3.2 Faktor Eksternal

3.2.1 Politik Internasional: Penolakan Terhadap Satu Negara Dua Sistem dan Satu Tiongkok

Hubungan harmonis antara Taiwan dan Tiongkok di era Ma Ying-jeou menjadi akar permasalahan dari Tsai Ing-wen. Secara ekonomi, kedekatan kedua negara tersebut menjadi kerja sama yang tidak menguntungkan bagi Taiwan sehingga mengakibatkan protes besar. Sedangkan dalam ranah internasional, pergerakan Taiwan menjadi semakin terbatas. Keterbatasan tersebut disepakati sebagai bagian dari PBB dan Konsensus 1992 yang terimplementasi dalam kebijakan satu Tiongkok. Kebijakan tersebut diperkuat dengan munculnya kebijakan satu negara dua sistem.

Secara definisi, kedua konsep tersebut memiliki perbedaan. Hsieh (2019) mengartikan bahwa kebijakan satu Tiongkok akan cenderung mengarah terhadap pengakuan secara internasional bahwa hanya ada satu Tiongkok di antara Tiongkok daratan dan Taiwan yang mewakili di PBB (Hsieh 2019). Sedangkan satu negara, dua sistem mengartikan mengenai konsep satu negara dengan dua sistem politik

yang berbeda. Namun, pemerintah Tiongkok berhak untuk melakukan intervensi secara politik ke Taiwan (Ibid). Di samping itu, wilayah administratif seperti Taiwan tidak memiliki hak untuk melakukan perdagangan secara bebas seperti Tiongkok.

Di era Ma, rasionalitas hubungan Taiwan-Tiongkok mengenai prinsip satu Tiongkok memiliki perbedaan (lihat 2.2). Namun secara ekonomi (lihat 2.1), keduanya memiliki hubungan yang erat. Hal ini terbukti saat Presiden Tiongkok, Xi Jinping dan Presiden Taiwan (KMT), Ma Ying-jeou bertemu di Singapura tahun 2015. Fakta inilah yang sudah dianalisis secara pasti oleh pihak oposisi, DPP.

Kampanye anti-Tiongkok terhadap pemerintah Tiongkok merupakan pertanda besar bahwa Taiwan memperlihatkan posisinya dalam menolak kebijakan satu negara dua sistem. Penolakan tersebut diakui sebagai bentuk teguran terhadap Tiongkok semasa era Ma. Hal ini menyebabkan kegagalan Tiongkok untuk melakukan penyatuan dengan Taiwan. Xi Jinping mengungkapkan kekhawatiran mengenai penolakan konsep tersebut di depan 23,5 juta orang. *The Associated Press* melaporkan pada tahun 2019 bahwa Tiongkok tidak segan untuk melakukan proses penyatuan dengan jalur militer jika Taiwan tetap menolak (Westerman 2019). Xi menyebutkan:

> *"We are willing to create a vast space for peaceful unification, but we will never leave any room for any sort of Taiwan independence separatist activities."*("Kami bersedia menciptakan ruang yang luas untuk penyatuan damai, tetapi kami tidak akan pernah meninggalkan ruang untuk segala jenis kegiatan separatis kemerdekaan Taiwan.") (Ibid).

Pemerintah Taiwan menanggapi akan mempertahankan tanah Taiwan dengan melawan melalui jalur militer juga jika hal itu yang diperlukan. DPP pernah membuka jalur kepada Tiongkok untuk memulai komunikasi dengan Taiwan secara damai dengan beberapa syarat. Pertama, Tiongkok harus mengakui bahwa Taiwan negara yang merdeka (Schubert and Lee 2021). Kedua, Tiongkok dapat menjamin hubungan kerja sama ekonomi maupun politik yang dapat menguntungkan kedua pihak (Ibid). Ketiga, Tiongkok dapat menghilangkan prinsip intervensi terhadap situasi domestik Taiwan (Ibid). Syarat-syarat tersebut tidak di respon oleh Tiongkok.

Tsai Ing-wen menolak konsep satu negara dua sistem dengan alasan berkaca kejadian di Hong Kong. Tiongkok mulai melakukan ekspansi kekuasaan di Hong Kong dengan mendorong pemerintah Hong Kong untuk menandatangani UU ekstradisi (Cheung and Hughes 2020). Sejak Hong Kong dikuasai Tiongkok melalui perjanjian dengan Inggris, ekonomi serta politik Hongkong mengalami katastrofe. Misalnya terjadi ketimpangan, semakin mahalnya biaya hidup, dan kualitas demokrasi semakin buruk. Dalam pidatonya Tsai pada 11 Januari 2020 yang menekankan demokrasi dapat dalam jalur yang berbahaya jika dibawa intervensi PKT (Kuo 2020).

Ketegasan Taiwan dalam menolak satu negara dua sistem tidak disambut dengan baik oleh Tiongkok. Sehingga, Tiongkok beberapa kali mengecam Taiwan dengan melancarkan serangan militer (lihat 2.2) di Selat Taiwan. Dengan adanya instabilitas politik antara Taiwan dan Tiongkok serta bentuk ketegasan Taiwan dalam menolak konsep tersebut. Pada akhir Desember 2019, Parlemen Taiwan menerbitkan UU anti-infiltrasi yang bertujuan untuk meredam intervensi Tiongkok

serta menghilangkan adanya penyebaran hoax, dan mengganggu ketertiban umum terhadap pemilu 2020 (Mainland Affairs Council Taiwan 2019). Dengan adanya UU tersebut, dipercaya untuk menyelamatkan demokrasi Taiwan. Sikap Taiwan seperti ini, dipertegas oleh aktivis DPP, Chen Ou-po setelah legislatif yuan meloloskan UU anti-infiltrasi:

> *"The rise of China has posed a threat to all countries, and Taiwan is facing the biggest threat. Taiwan is on the frontline of Chinese infiltration and urgently needs the anti-infiltration law to protect people's rights."* ("Kebangkitan China telah menjadi ancaman bagi semua negara dan Taiwan sedang menghadapi ancaman terbesar. Taiwan berada di garis terdepan dari infiltrasi China sehingga membutuhkan undang-undang anti-infiltrasi untuk melindungi hak-hak rakyat") (Reuters 2019).

Dengan penolakan tersebut, Taiwan menginginkan berdirinya sistem demokrasi yang mandiri. Maka dari itu, Taiwan selalu berhubungan politik dengan AS sebagai mitra baru yang lima tahun belakangan dekat dengan Taiwan. Meskipun, saat ini Tsai hanya menolak adanya kebijakan satu Tiongkok, terdapat rencana bahwa Taiwan mencoba untuk melakukan penolakan terhadap kebijakan satu Tiongkok dengan memanfaatkan aliansi dan dukungan dari AS.

3.2.2 Politik Internasional: Kemenangan Donald Trump di Pemilu AS Berdampak ke Taiwan

8 November 2016, Donald Trump dari Republik (konservatif) berhasil mengambil kursi presiden AS melalui jalur yang demokratis. Dengan mendapatkan suara pemilu sebesar 306, kemenangan Trump langsung direspon oleh Tsai Ing-wen (The New York Times 2017). Terpilih lebih awal, Tsai langsung membuka pembicaraan dengan Trump melalui saluran telepon. Komunikasi tersebut ditandai sebagai hubungan AS-Taiwan memasuki era baru. Bonnie Glaser, Direktur dari *China Power Project* di *Center for Strategic and International Studies* berargumen dengan komunikasi tersebut diindikasikan bahwa pemerintah Trump tidak mengetahui seberapa sensitif isu Taiwan-Tiongkok (Taiwan News 2020).

Trump membuat sejarah bagi kebijakan luar negeri AS sejak tahun 1979. Daniel Blumenthal, *American Enterprise Institute* merespon peristiwa tersebut sebagai salah satu bentuk progres dari hubungan AS-Taiwan (Blumenthal 2011). Kebijakan Trump terhadap Taiwan berbeda dengan orientasi yang dibangun oleh Obama (lihat 2.5). Berkat Perang Dagang, Trump beranggapan bahwa Tiongkok telah 'memperkosa' negaranya secara ekonomi

Melalui wawancara Trump dengan *The Wall Street Journal* tahun 2017, status Taiwan secara internasional dapat dinegosiasi. Ketika diwawancara oleh *Fox News*:

> *"I fully understand the one China' policy, but I don't know why we have to be bound by a 'one China' policy unless we make a deal with China having to do with other things, including trade"* ("Saya sepenuhnya

> memahami kebijakan ‘satu Tiongkok’, tetapi saya tidak tahu mengapa kita harus terikat oleh kebijakan ‘satu Tiongkok’ kecuali jika kita membuat kesepakatan dengan Tiongkok yang berkaitan dengan hal-hal lain, termasuk perdagangan”) (The South China Morning Post 2016).

Trump tidak memiliki pengetahuan mengenai definisi kebijakan satu Tiongkok yang selama ini telah dimengerti oleh pemimpin sebelum Trump menjabat. Di tahun 2017, Trump juga mengumumkan untuk memulai transaksi militer dengan Taiwan untuk memenuhi TRA dengan dana yang meningkat secara signifikan (Glaser, Bush, and Green 2020). Meskipun perjanjian tersebut diikuti oleh Trump, senjata-senjata militer yang diberikan Trump terhadap Taiwan terlampau masif (lihat tabel 4). Kebijakan Trump tersebut direspon oleh Menteri Pertahanan AS, Mattis di *Shangri-La Dialogue* (Department of Defence 2017). Menurut Mattis, pengiriman tersebut berguna untuk memenuhi seluruh persyaratan yang sudah berada di dalam pasal-pasal TRA. Misalnya dalam poin ke-5 bagian B, AS akan menyediakan Taiwan angkatan bersenjata. Menurut Ash Carter, Mantan Pertahanan AS, Trump sudah berhasil menancapkan titik di Taiwan dalam strateginya menghadapi dinamika Indo-Pasifik.

Ada beberapa peraturan mengenai Taiwan yang pernah dilakukan oleh Trump untuk mendukung pemerintahan Tsai meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik. Pertama, Trump menandatangani *the Taiwan Travel Act* pada tahun 2017 (Congress.gov, n.d.). Hal ini dilakukan oleh Trump dengan alasan sejarah. Sejak TRA disahkan pada 1979, AS-Taiwan memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dalam berbagai tingkat kabinet (Ibid). UU tersebut membantu

melindungi seluruh kabinet AS maupun Taiwan untuk berkunjung secara resmi. Aturan tersebut digunakan oleh Tsai pada tahun 2019. Tsai Ing-wen melakukan kunjungan resmi ke New York dan Denver untuk memperkuat relasinya dengan wilayah Karibia (termasuk Haiti, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, and Saint Kitts and Nevis) (Taiwan News 2019). Dalam kunjungan tersebut, Tsai menekankan untuk menyebarkan nilai-nilai 'Taiwan' yang berbasis demokrasi, kebebasan, dan berkelanjutan (selaras dengan politik AS) (deLisle and Dreyer 2021).

Kedua, tahun 2019 Trump juga meloloskan *the Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative* (TAIPEI) *Act* (Congress.gov n.d). UU tersebut digunakan sebagai bentuk lanjutan dari *the Taiwan Travel Act:*

> *"Encourage the travel oh high-level United States officials to Taiwan in accordance with the Taiwan Travel Act"* ("Dorong perjalanan oh pejabat tinggi Amerika Serikat ke Taiwan di sesuai dengan *the Taiwan Travel Act*") (Ibid).

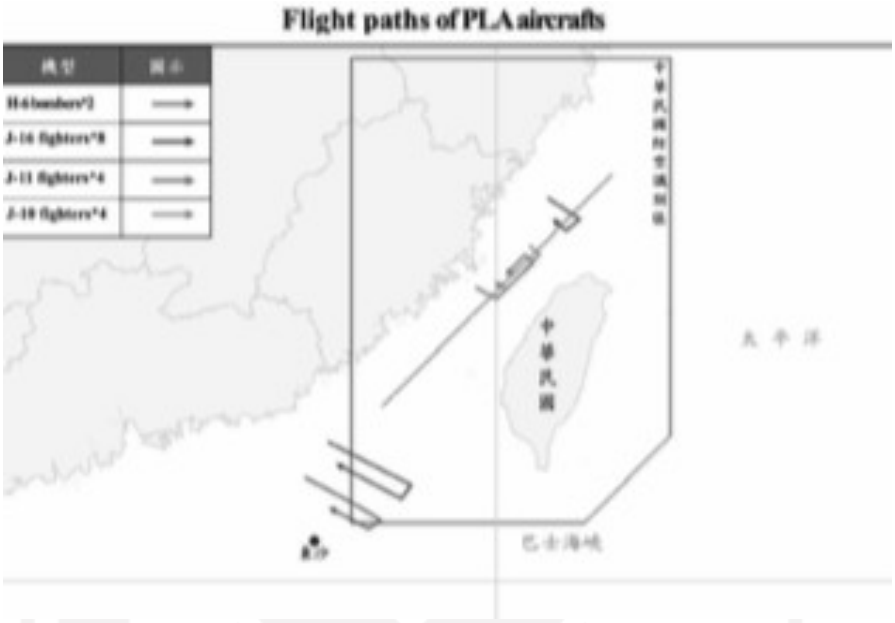
Sejak Tsai terpilih tahun 2016, beberapa negara seperti Burkina Faso, El Salvador, Kepulauan Solomon, Panama memutuskan hubungan dengan Taiwan dan memilih Tiongkok sebagai mitra. Menurut *Unpresented Nations and Peoples Organisation*, UU tersebut dimaksudkan untuk menekan Tiongkok (UNPO 2020). Trump mendukung Taiwan dengan aliansinya. Hal ini dilakukan meskipun AS tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. UU tersebut juga dimaksudkan untuk mendukung Taiwan secara ekonomi maupun pertahanan. Dalam poin 3

bagian A, UU tersebut bahwa AS mendukung Taiwan untuk memiliki kawasan yang stabil dan damai (Congress.gov n.d). Bahkan dalam poin 1 dan 2 bagian ke-3, AS memastikan bahwa hubungan kedua negara secara ekonomi meningkat dari segi perdagangan hingga investasi (Ibid).

Ketiga, di tahun 2020, Trump kembali meningkatkan hubungannya dengan Taiwan. Trump menyepakati aturan mengenai *the Taiwan Assurance Act* (Congress.gov n.d). Aturan tersebut tidak hanya mendukung Taiwan secara militer, tetapi mendukung Taiwan untuk menjadi anggota dari *the World Health Organisation* (WHO), *the International Civil Aviation Organization* (ICAO), hingga *the International Criminal Police Organization* (INTERPOL) (Chen 2020). Melalui UU tersebut, AS juga mengalokasikan $3 juta untuk aktivitas kedua negara dalam U.S-Taiwan *Global Cooperation and Training Framework* (GCTF) (Ibid). GCTF dipergunakan sebagai wadah bagi AS-Taiwan untuk mengembangkan aspek kesehatan publik, pemberdayaan wanita, keamanan jaringan, hingga literasi media.

Mengenai kedekatan dengan Trump, Tsai merespon bantuan tersebut pada saat diwawancarai oleh *Reuters* bahwa kehadiran AS dipercaya dapat menjaga stabilitas Taiwan dari tekanan Tiongkok. Tiongkok tidak mendukung adanya proses Taiwan yang terbuka dengan masyarakat global. Menurut Tiongkok, perilaku yang dibuat oleh Trump telah merusak kinerja Tiongkok dalam melakukan proses penyatuan kembali. Sehingga, Tiongkok melakukan spekulasi ke Selat Taiwan dengan mengirimkan militer (lihat tabel 3).

Gambar 2 Peta Operasi PLA di Taiwan



Sumber: Glaser, Bush, and Green (2020)

Kebijakan Trump terhadap Taiwan dan serangan Tiongkok di Taiwan menjadi faktor penting posisi Taiwan dalam skala internasional. Dengan kata lain, Tsai menolak kehadiran Tiongkok di Selat Taiwan dan menggagalkan kebijakan Tiongkok untuk mengintervensi Taiwan.

BAB IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

Taiwan merupakan salah satu negara yang terisolasi di Asia Timur bahkan secara internasional. Kesepakatan dari Konsensus 1992 mengenai kebijakan satu Tiongkok menjadi faktor utama. Di era Ma Ying-jeou, hubungan Tiongkok-Taiwan secara ekonomi meningkat. Hal ini terbukti disaat kedua negara membangun payung kerja sama tersebut di tahun 2010 serta dilanjutkan pada tahun 2013 melalui CSSTA. Namun, ketika ingin diratifikasi dalam konteks domestik Taiwan, hal itu justru menimbulkan penolakan dari masyarakat Taiwan melalui *sunflower movement.* Fakta tersebut membuktikan bahwa Taiwan bergantung dengan Tiongkok. Puncak hubungan Tiongkok dan Taiwan berada di tahun 2015. Pertemuan Ma Ying-jeou dengan Xi Jinping di Singapura menjadi pertemuan bersejarah terkait dengan hubungan pemerintah ke pemerintah (G-G). Selama ini, pertemuan Tiongkok dan Taiwan diwakili oleh ARATS dan SEF.

Namun, dengan bergantungnya Tiongkok dan Taiwan, peran Amerika Serikat di Taiwan tidak terlalu signifikan. Hal itu juga menyangkut terkait dengan kedekatan AS ke Tiongkok yang cenderung memiliki hubungan yang baik di bawah pemerintahan Barack Obama. Pemberian militer ke Taiwan atas janji Amerika Serikat di dalam TRA tidak berjalan dengan masif. Terbukti dari tahun 2012-2014 tidak ada pengiriman militer ke Selat Taiwan. Di samping itu, kerja sama ekonomi Taiwan dan Amerika Serikat juga melalui TIFA berhenti sampai tahun 2013. Hal ini membuktikan bahwa peran AS di Taiwan tidak berjalan dengan pesat dengan dibuktikan perhatian Obama terhadap kebijakan satu Tiongkok.

Wajah politik luar negeri Taiwan berubah ketika Tsai Ing-wen mendapatkan kursi kepresidenan tahun 2016. Tsai Ing-wen menolak berhubungan dengan Tiongkok. Secara otomatis, Tsai juga menolak kebijakan satu negara dua sistem dari Tiongkok. Tsai mempromosikan nilai-nilai liberal seperti kebebasan individu, demokrasi, dan perdamaian. Sikap itu diambil oleh Tsai dengan memandang implikasi yang berada di Hong Kong. Sehingga, dari kebijakan Tsia yang agresif membuat Tiongkok merasa terancam. Sebagai respon, Tiongkok mengirimkan pasukan militernya ke ADIZ Taiwan.

Hubungan AS dan Taiwan meningkat secara ekonomi maupun pertahanan. Di saat yang bersamaan, Donald Trump terpilih menjadi presiden AS tahun 2016. Ketika Trump terpilih, Tsai langsung melakukan hubungan melalui jalur telepon untuk mengkonfirmasi hubungan ke depan AS-Taiwan. Faktanya, komunikasi tersebut menjadi kontroversi politik. Trump melancarkan kebijakannya terhadap Taiwan tidak hanya mengirimkan senjata militer yang masif (2017-2020), tetapi membangun kerja sama ekonomi. Puncak kerja sama kedua negara difasilitasi oleh BTA. Melalui wadah tersebut, Tsai melegalkan ekspor babi AS yang yang selama ini diperdebatkan dalam parlemen Taiwan.

Perubahan kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok ke AS dipengaruhi oleh empat faktor. Faktor-faktor tersebut dilandasi pemikiran dari William D. Coplin mengenai teori *decision making*. Teori tersebut menekankan aspek kebijakan luar negeri suatu negara didorong pada dua faktor yaitu internal dan eksternal. Pertama, implikasi kebijakan luar negeri Taiwan yang condong ke arah Tiongkok sehingga menimbulkan *sunflower movement*. Faktor tersebut menghasilkan opini publik yang berpengaruh pada pemilu Taiwan tahun 2016.

Kedua, perubahan kebijakan luar negeri juga didorong oleh orientasi ideologi dari DPP. Menilai ideologi DPP dilakukan melalui basis sejarah pendirian yang berdampak pada periode 2016-2020. Ketiga, penolakan DPP mengenai satu negara dua sistem. Penolakan tersebut dilakukan untuk mencegah Tiongkok melakukan intervensi terhadap Taiwan. Di samping itu, Tsai memiliki rencana mendorong Taiwan untuk berpartisipasi di dalam organisasi internasional. Keempat, kemenangan Trump dalam pemilu AS tahun 2016 berdampak ke Taiwan. Untuk mendukung Taiwan, Trump beberapa kali meloloskan peraturan seperti *the Taiwan Travel Act* hingga *the Taiwan Assurance Act* tahun 2020.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan dari bab 1 hingga bab 3, penulis menginginkan untuk memberikan rekomendasi terhadap penelitian selanjutnya. Hal ini mengingat isu AS-Taiwan-Tiongkok masih berlangsung panas di kawasan Asia Timur:

1. Penulis merekomendasikan untuk melanjutkan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama dengan teori yang berbeda. Untuk itu, judulnya 'Analisis Kebijakan Luar Negeri Taiwan Terhadap *China-Oriented* ke *the United States-Oriented* Ditinjau dari Perspektif Konstruktivisme'. Topik ini menjadi menarik untuk melihat dan memandang dari perspektif yang berbeda untuk menganalisis isu tersebut karena hubungan Taiwan dan Amerika Serikat ke Tiongkok masih tidak baik.

2. Penulis merekomendasikan penelitian tentang “Hubungan Kerja sama Taiwan dan Amerika Serikat di Era Tsai Ing-wen”. Topik ini penting dengan terpilihnya Tsai untuk kedua kalinya di Taiwan yang akan semakin erat membuat hubungan dengan Amerika Serikat.
3. Peran Indonesia juga penting dalam memandang hubungannya terhadap Tiongkok dan Taiwan. Di samping itu, Indonesia berhasil membuat hubungan dengan Taiwan tanpa membuat Tiongkok merasa terancam.

Daftar Pustaka

AEDE. 2018. "How the United States Withdrawal from the Trans-Pacific Partnership Benefits China." AEDE. https://aede.osu.edu/sites/aede/files/publication_files/How%20the%20United%20States%20Withdrawal%20from%20the%20Trans-Pacific%20Partnersh.pdf.

Air University. 2017. "In Line or Out of Order? China's Approach to ADIZ in Theory and Practice." Air University. https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/CASI/documents/Research/China%E2%80%99s%20Approach%20to%20ADIZ%20in%20Theory%20and%20Practice.pdf?ver=2017-11-22-104834-047.

Bendix, Aria. 2017. "Trump Administration Approves Its First Arms Sale to Taiwan." The Atlantic. https://www.theatlantic.com/news/archive/2017/06/trump-administration-approves-its-first-arms-sale-to-taiwan/532239/.

Blumenthal, Dan. 2011. "Rethinking US foreign policy towards Taiwan." American Enterprise Institute. https://www.aei.org/articles/rethinking-us-foreign-policy-towards-taiwan/.

Buckley, Chris. 2017. "Taiwan Responds After China Sends Carrier to Taiwan Strait (Published 2017)." The New York Times. https://www.nytimes.com/2017/01/10/world/asia/china-taiwan-strait-aircraft-carrier-trump.html.

Bureau of Foreign Trade (Taiwan). n.d. "Trade Statistics." http://cus93.trade.gov.tw/ENGLISH/FSCE/.
Bureau of Foreign Trade (Taiwan). n.d. "Trade Statistics." http://cus93.trade.gov.tw/ENGLISH/FSCE/.
Cabestan, Jean-Pierre. 2011. *The Future of United States, China, and Taiwan Relations*. N.p.: Palgrave Macmillan US.

Carnegie Endowment for International Peace. 2021. "Deepening the US-Taiwan Economic Partnership." Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org/2021/03/04/deepening-u.s.-taiwan-economic-partnership-pub-83978.

Census Bureau. n.d. "Foreign Trade - US Trade with China." Census Bureau. https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html.

Chen, Chien-Kai. 2018. *Political Economy of China–Taiwan Relations: Origins and Development*. N.p.: Lexington Books.

Chen, Kelvin. 2020. "Trump signs Taiwan Assurance Act into law." Taiwan News. https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4088320.

Cheng, Tracey. 2015. "Taiwan's Sunflower Protest. Digital Anatomy of a Movement 2015." https://doi.org/10.25969/mediarep/1488.

Cheung, Helier, and Roland Hughes. 2020. "Why are there protests in Hong Kong? All the context you need." BBC. https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48607723.

Chiang, Frank. 2017. *The One-China Policy: State, Sovereignty, and Taiwan's International Legal Status*. N.p.: Elsevier Science.

Chiu, Hungdah. 1993. “Association for Relations Across the Taiwan Straits (ARATS) (Established in the People's Republic of China)-Straits Exchange Foundation (SEF) (Established in the Republic of China): Agreements concerning Cross-Strait Activities.” *International Legal Materials* 32 (5).

Chow, P., ed. 2014. *The US Strategic Pivot to Asia and Cross-Strait Relations: Economic and Security Dynamics*. N.p.: Palgrave Macmillan.

Chung, Lawrence. 2016. “Beijing threatens to suspend talks with Taipei until Tsai Ing-wen acknowledges '1992 consensus.'” South China Morning Post. https://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1949425/beijing-threatens-suspend-talks-taipei-until-tsai-ing.

CNBC. 2020. “Taiwan's pro-growth policy to continue after Tsai election win as supply chains shift in US-China trade war.” CNBC. https://www.cnbc.com/2020/01/13/taiwan-elections-tsai-to-continue-pro-growth-policy-amid-us-china-trade-war.html.

Congress.gov. n.d. “Text - S.1678 - 116th Congress (2019-2020): Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI) Act of 2019.” Congress.gov. https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1678/text.

Congress.gov. n.d. “Text - S.2736 - 115th Congress (2017-2018): Asia Reassurance Initiative Act of 2018.” Congress.gov. https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/2736/text.

Congress.gov, Senator. n.d. “Text - HR535 - 115th Congress (2017-2018): Taiwan Travel Act | Congress.gov | Library of Congress.” Congress.gov. Accessed

February 28, 2022. https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/535/text.

Coplin, William D., and Maesedes Marbun. 2003. *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis*. N.p.: Sinar Baru Algensindo, Bandung.

Copper, John F. 2013. *The KMT Returns to Power: Elections in Taiwan 2008 to 2012*. N.p.: Lexington Books.

Cresswell, John W. 1999. "Mixed-Method Research: Introduction and Application." In *Handbook of Educational Policy*. N.p.: Academic Press.

Defense Security Cooperation Agency. n.d. "Major Arms Sales." Defense Security Cooperation Agency. https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales.

Defense Security Cooperation Agency. n.d. "Taipei Economic and Cultural Representative Office (TECRO) in the United States - Block I-92F MANPAD Stinger Missiles and Related Equipment and Support." Defense Security Cooperation Agency. https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/taipei-economic-and-cultural-representative-office-tecro-united-states.

deLisle, Jacques, and Jean-Pierre Cabestan, eds. 2014. *Political Changes in Taiwan Under Ma Ying-jeou: Partisan Conflict, Policy Choices, External Constraints and Security Challenges*. N.p.: Taylor & Francis.

deLisle, Jacques, and June T. Dreyer, eds. 2021. *Taiwan in the Era of Tsai Ing-wen: Changes and Challenges*. N.p.: Taylor & Francis.

Department of Defence. 2017. "Remarks by Secretary Mattis at Shangri-La Dialogue." Department of Defense.

https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/1201780/remarks-by-secretary-mattis-at-shangri-la-dialogue/.

Department of Statistics. n.d. “Economic Indicators.” Economic Indicators - Department of Statistics. https://www.moea.gov.tw/Mns/dos_e/content/ContentLink.aspx?menu_id=6748.

Dewi, Inneke F., and Karina U. Dewi. 2019. “Strategi Pemerintahan Xi Jinping Terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok.” *Jurnal Hubungan Internasional* 7 (2): 164-165.

Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, ROC. n.d. “GDP.” Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, ROC. https://eng.dgbas.gov.tw/mp.asp?mp=2.

Eastman, Llyod E. 1986. “New Perspectives on the History of Nationalist China.” *The History Teacher* 19 (4).

Everington, Keoni. 2020. “US House unanimously passes TAIPEI Act.” Taiwan News. https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3885393.

Fell, Dafydd. 2016. “Small Parties in Taiwan's 2016 National Elections: A Limited Breakthrough?” *American Journal of Chinese Studies* 23 (1).

Fell, Dafydd, ed. 2017. *Taiwan's Social Movements Under Ma Ying-jeou: From the Wild Strawberries to the Sunflowers*. N.p.: Taylor & Francis.

Fell, Dafydd. 2018. *Government and Politics in Taiwan*. N.p.: Taylor & Francis.

France24. 2020. “Taiwan's president rejects 'one country, two systems' deal with China.” France 24. https://www.france24.com/en/20200520-taiwan-s-president-tsai-rejects-one-country-two-systems-deal-with-china.

Ger, Yeong-kuang. 2015. “Cross-Strait Relations and the Taiwan Relations Act.” *American Journal of Chinese Studies* 22 (2): 235.

Glaser, Bonnie S., Richard C. Bush, and Michael J. Green. 2020. “Toward a Stronger US-Taiwan Relationship.” Amazon AWS. https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/201021_Glaser_TaskForce_Toward_A_Stronger_USTaiwan_Relationship_0.pdf.

Gong, Li, William C. Kirby, and Robert S. Ross, eds. 2007. *Normalization of U.S.-China Relations: An International History*. N.p.: Harvard University Press.

He, Mingxiu. 2019. *Challenging Beijing's Mandate of Heaven: Taiwan's Sunflower Movement and Hong Kong's Umbrella Movement*. N.p.: Temple University Press.

Higgins, Tucker -. 2019. “Bad sign for trade talks: Trump calls China President Xi 'enemy.'” CNBC. https://www.cnbc.com/2019/08/23/bad-sign-for-trade-talks-trump-calls-china-president-xi-enemy.html.

Hille, Kathrin, and Aime Williams. 2020. “Taiwan eases restrictions on US pork and beef imports.” Financial Times. https://www.ft.com/content/06299fda-9139-42b8-8b4e-09568a7cdfb8.

Hsieh. 2019. “One China “Policy” VS “Principle”: How Language is Used to Obscure Discussion on Taiwan.” New Bloom Magazine. https://newbloommag.net/2019/04/21/one-china-policy-principle/.

Hsiao, Hsin-Huang Michael, and Po-San Wan. 2017. “The student-led movements of 2014 and public opinion: A comparison of Taiwan and Hong Kong.” *Asian Journal of Comparative Politics* 3 (1).

Hsieh. 2016. “Taiwan's 2016 Elections: Critical Elections?” *American Journal of Chinese Studies* 23 (1).

Hsu, Chien-Jung. 2014. *The Construction of National Identity in Taiwan's Media, 1896-2012*. N.p.: Brill.

Hu, Weixing. 2013. *New Dynamics in Cross-Taiwan Strait Relations: How Far Can the Rapprochement Go?* N.p.: Taylor & Francis.

Invest Xiamen. n.d. “Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone.” https://www.investxiamen.org.cn/detail_en/544.html.

Kennedy, Scott, and Matthew P. Funaiole. 2018. “New Southbound Policy | Center for Strategic and International Studies.” Center for Strategic and International Studies |. https://www.csis.org/programs/china-power-project/taiwan/new-southbound-policy.

Klein, Jodi X. 2020. “Is TSMC's Arizona project a US supply chain win? Or a cautionary tale?” South China Morning Post. https://www.scmp.com/tech/innovation/article/3088489/tsmcs-arizona-project-us-tech-supply-chain-win-or-cautionary-tale.

Klöter, Henning. 2004. “Language Policy in the KMT and DPP eras.” *Open Edition Journal*.

Kosenkov, Kirill. 2015. “Global Firepower 2015 - knoema.com.” Knoema. https://knoema.com/infographics/ssmsxvd/global-firepower-2015.

Kotschwar, Barbara, Jeffrey J. Schott, and Julia Muir. 2013. *Understanding the Trans-Pacific Partnership*. N.p.: Peterson Institute For International Economics.

Kuo, Lily. 2020. “Taiwan election: Tsai Ing-Wen wins landslide in rebuke to China.” The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2020/jan/11/taiwan-re-elects-tsai-ing-wen-as-president-in-clear-message-to-china.

Kuo, Lily. 2020. “Tsai Ing-wen says China must 'face reality' of Taiwan's independence.” The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2020/jan/15/tsai-ing-wen-says-china-must-face-reality-of-taiwans-independence.

Larus, Elizabeth F., and Sam Robbins. 2020. “The TAIPEI Act: well intended but uncertain?” Taiwan Insight. https://taiwaninsight.org/2020/04/27/the-taipei-act-indicates-congressional-support-for-taiwan-but-implementation-is-uncertain/.

Lary, Diana. 2015. *China's Civil War: A Social History, 1945-1949*. N.p.: Cambridge University Press.

Lee, Chun-yi, and Ming-xi Yin. 2017. “Chinese Investment in Taiwan: A Challenge or an Opportunity for Taiwan?” *Journal of Current Chinese Affairs* 46 (1).

Li, Xiaobing. 2019. *The History of Taiwan*. N.p.: ABC-CLIO.

Lin, Gang, and Wenxing Zhou. 2018. “Does Taiwan Matter to the United States? Policy Debates on Taiwan Abandonment and Beyond.” *The China Review* 18 (3).

Lin, Sean. 2020. “Taiwan to ease rules on US pork, beef.” Taipei Times. https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2020/08/29/2003742461.

Lovely, Mary E., and Zixuan Huang. 2018. “Foreign Direct Investment in China's High-technology Manufacturing Industries.” *China & World Economy* 26 (5).

Lowther, William. 2015. “Obama 'supports' Taiwan in Xi talks.” Taipei Times. https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2015/09/27/2003628680.

Lu, Max. 2020. “Tsai Ing-wen Wins Taiwanese Elections.” Nspirement. https://www.nspirement.com/2020/01/18/tsai-ing-wen-wins-taiwanese-elections2.html.

Mainland Affairs Council. 2016. “ㄌㄞBqㄘÆㄟ■晢褲□ (Liangan jingji jidu tongji subao, Statistic Overview of Economic Exchange across the Strait).” <www.mac.gov.tw/lp.asp?ctNode= 5722&CtUnit=3998&BaseDSD=7&mp=1>.

Mainland Affairs Council. 2016. “ㄌㄕ□ 窘ㄋ豭ㄏ□ (Liangan xieyi zhixing chengxiao, Status of Implemented Cross-strait Agreements).” <www.mac.gov.tw/ct.asp?xItem=102611&CtNode=7526& mp=1>.

Mainland Affairs Council Taiwan. 2019. “Legislative Yuan Passes Anti-Infiltration Bill to Strengthen Defense for Democracy and Preserve Stable and Orderly Cross-Strait Exchanges.” https://www.mac.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=2BA0753CBE348412&s=88E5E1EF1343B1B8.

Malik, Ahmad R. 2018. “US Withdrawal from the Trans-Pacific Partnership.” *Strategic Studies* 38 (1).

Matsuda, Yosuhiro. 2015. “Cross-Strait Relations under the Ma Ying-jeou administration: From Economic to Political Dependence?” *Journal of Contemporary East Asia Studies* 4 (2).

Ministry of Economic Affairs. 2014. “Overseas Chinese and Foreign Investment Commission (Taiwan).”

Ministry of National Defense, R.O.C (Taiwan). 2020. “PLA aircraft crossed the midline of the Taiwan Strait and entered Taiwan’s southwest ADIZ.” https://www.mnd.gov.tw/Publish.aspx?p=77350&title=%E5%9C%8B%E9%98%B2%E6%B6%88%E6%81%AF&SelectStyle=%E5%8D%B3%E6%99%82%E8%BB%8D%E4%BA%8B%E5%8B%95%E6%85%8B.

Ministry of National Defense, R.O.C (Taiwan). 2020. “PLA aircraft crossed the midline of the Taiwan Strait and entered Taiwan's southwest ADIZ.” https://www.mnd.gov.tw/Publish.aspx?p=77350&title=%E5%9C%8B%E9%98%B2%E6%B6%88%E6%81%AF&SelectStyle=%E5%8D%B3%E6%99%82%E8%BB%8D%E4%BA%8B%E5%8B%95%E6%85%8B.

Mullen, Andrew, and Chad Bown. 2022. “Was the US-China phase-one trade deal a 'historic failure', and what's next?” South China Morning Post. https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3168399/us-china-trade-war-was-phase-one-trade-deal-historic-failure.

Nakamura, David. 2017. “At Mar-a-Lago, Trump welcomes China's Xi in first summit.” The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/politics/at-mar-a-lago-trump-to-welcome-chinas-xi-for-high-stakes-inaugural-summit/2017/04/06/0235cdd0-1ac2-11e7-bcc2-7d1a0973e7b2_story.html.

National Statistics, Republic of China (Taiwan). n.d. “Labor workers.” National Statistics, Republic of China (Taiwan). https://eng.stat.gov.tw/mp.asp?mp=5.

Nellis, Stephen, and David Holmes. 2021. “TSMC says has begun construction at its Arizona chip factory site.” Reuters. https://www.reuters.com/technology/tsmc-says-construction-has-started-arizona-chip-factory-2021-06-01/.

Office of the President Republic of China(Taiwan). 2016. “President Tsai's 2016 National Day Address.” Office of the President Republic of China(Taiwan). https://english.president.gov.tw/News/4997.

Office of the U.S Trade Representative. n.d. “Taiwan | United States Trade Representative.” USTR. https://ustr.gov/countries-regions/china/taiwan.

Pew Research. 2020. “How People in Taiwan View Mainland China and the U.S.” Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/global/2020/05/12/in-taiwan-views-of-mainland-china-mostly-negative/.

Phillips, Tom. 2015. “Leaders of China and Taiwan meet for first time in nearly seven decades.” The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2015/nov/07/chinas-xi-jinping-and-taiwans-ma-ying-jeou-shake-hands-in-historic-meeting.

Ramzy, Austin. 2016. “Tsai Ing-wen Elected President of Taiwan, First Woman to Hold Office (Published 2016).” The New York Times. https://www.nytimes.com/2016/01/17/world/asia/taiwan-elections.html.

Reuters. 2015. “Obama administration authorizes $1.83 billion arms sale to Taiwan.” Reuters. https://www.reuters.com/article/us-usa-taiwan-arms-idUSKBN0TZ2C520151216.

Reuters. 2019. “Taiwan passes law to combat Chinese influence on politics.” Reuters. https://www.reuters.com/article/us-taiwan-lawmaking-idUSKBN1YZ0F6.

Rigger, Shelley. 2001. *Taiwan's Democratic Progressive Party : from opposition to power*. N.p.: Lynne Rienner Publishers.

Rosier, Kevin, Sean O'Connor, and Rolando Cuevas. 2016. “Taiwan's Economy amid Political Transition.” U.S.-China Economic and Security Review Commission. https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/Taiwan%27s%20Economy%20amid%20Political%20Transition.pdf.

Rowen, Ian. 2015. “Inside Taiwan's Sunflower Movement: Twenty-Four Days ina Student-Occupied Parliament, and the Future of the Region.” *Journal of Asian Studies* 74 (1).

Schubert, Gunter, and Chun-yi Lee, eds. 2021. *Taiwan During the First Administration of Tsai Ing-wen: Navigating in Stormy Waters*. N.p.: Taylor & Francis.

South China Morning Post. 2016. “Taiwan's Tsai Ing-Wen initiated phone call with Donald Trump, says island's presidential spokesman.” South China Morning Post. https://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2051450/taiwans-tsai-ing-wen-initiated-phone-call-donald-trump.

Su, Chi. 2008. *Taiwan's Relations with Mainland China: A Tail Wagging Two Dogs*. N.p.: Taylor & Francis.

Subba, Bhim. 2016. "Taiwan's 2016 Elections: Inclusive Politics and Status Quo Continuum." *China Report* 52 (3).

Taipei Times. 2021. "Survey shows 'Chinese' identity at a record low." Taipei Times. https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2021/07/24/2003761369.

Taiwan News. 2015. "Ma, Xi to split dinner bill in Singapore." Taiwan News. https://www.taiwannews.com.tw/en/news/2831105.

Taiwan News. 2017. "Taiwan's president to make Hakka a compulsory language at schools." Taiwan News. https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3195730.

Taiwan News. 2019. "Tsai embarks on Caribbean trip to seek cooperation and space for Taiwan." Taiwan News. https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3742918.

Taiwan News. 2020. "Taiwan's New Power Party announces new chairman." Taiwan News. https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3997603.

Taiwan News. 2020. "US support for Taiwan would remain strong under Biden: Expert." Taiwan News. https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4040746.

Taiwan Today. 2016. "Tsai Ing-wen wins 2016 ROC presidential election." Taiwan Today. https://taiwantoday.tw/news.php?unit=2&post=3819.

Tanasaldy, Taufiq. 2017. *Hubungan luar negeri Taiwan: penentu kebijakan dan studi kasus*. N.p.: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Temur, Nur S. 2020. "U.S. Foreign Policy Towards Taiwan: Obama vs. Trump." *Alinteri Journal of Social Sciences* 4 (1).

Tersiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*. N.p.: Anak Hebat Indonesia.

The News Lens. 2016. "the 2016 Taiwan legislature election." https://www.thenewslens.com/article/34638.

The New York Times. 2017. "2016 Presidential Election Results – Election Results 2016 – The New York Times." The New York Times. https://www.nytimes.com/elections/2016/results/president.

The South China Morning Post. 2016. "'I don't know why we have to be bound by a one-China policy': Trump questions decades-long stance." South China Morning Post. https://www.scmp.com/news/world/article/2053740/trump-questions-one-china-policy.

The Wall Street Journal. 2021. "China's Xi Emphasizes 'Peaceful Reunification' With Taiwan, Days After Record Show of Force." The Wall Street Journal. https://www.wsj.com/articles/chinas-xi-emphasizes-peaceful-reunification-with-taiwan-days-after-record-show-of-force-11633846538.

Thojnar, Ewa. 2016. "Taiwan's Economic Security in the Context of Cross-Strait Interdependence." 11 (1): 140.

Thompson, Drew. 2018. "Hope on the Horizon: Taiwan's Radical New Defense Concept." War on the Rocks. https://warontherocks.com/2018/10/hope-on-the-horizon-taiwans-radical-new-defense-concept/.

Tsai, Tung-chieh, and Tony T. Liu. 2017. “Journal of Current China Affairs.” *Cross-Strait Relations and Regional Integration: A Review of the Ma Ying-jeou Era (2008–2016)* 46 (1).

Tseng, Hu-Yi K. 2014. *The Sunflower Movement in Taiwan An Assessment*. N.p.: East Asian Institute, National University of Singapore.

TVBS Poll Center. 2014. “Polls on the Sunflower Movement after 300 rally.” 民意調查中心. https://cc.tvbs.com.tw/portal/file/poll_center/2017/20170602/20140401141358351.pdf.

United Nations. 1971. “Restoration of the lawful rights of the People's Republic of China in the United Nations.” United Nations Digital Library System. https://digitallibrary.un.org/record/192054?ln=en.

UNPO. 2020. “UNPO: Taiwan: Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI) Act waiting to be signed or vetoed by the US President.” Unrepresented Nations and Peoples Organization. https://unpo.org/article/21782.

U.S Census Bureau. 2015. “NAICS data base.” http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html.

U.S. Census Bureau. 2019. “Foreign Trade - US Trade with .” U.S. Census Bureau. https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/top/top1912yr.html.

U.S.-China Economic and Security Review Commission. 2016. “Taiwan Opposition Party Wins Presidency and Legislative Majority in Historic Elections.” https://www.uscc.gov/research/taiwan-opposition-party-wins-presidency-and-legislative-majority-historic-elections.

US-China Institute. 2018. “Taiwan Travel Act, 2018 | US-China Institute.” USC U.S.-China Institute. https://china.usc.edu/taiwan-travel-act-2018.

US Environmental Protection Agency. 2021. “EPA's Administrators | US EPA.” US Environmental Protection Agency. https://www.epa.gov/history/epas-administrators.

Wang, Chi. 2016. *Obama's Challenge to China: The Pivot to Asia*. N.p.: Taylor & Francis.

Westerman, Ashley. 2019. “Xi Urges Peaceful Unification Of China And Taiwan, But Won't Rule Out Using Force.” NPR. https://www.npr.org/2019/01/02/673986174/xi-urges-peaceful-unification-of-china-and-taiwan-but-wont-rule-out-using-force.

White House. 2016. “U.S. Fact Sheet for President Obama's Bilateral Meeting with President Xi Jinping.” Obama White House Archives. https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/09/03/us-fact-sheet-president-obamas-bilateral-meeting-president-xi-jinping.

Widmaier, Wesley. 2014. *Presidential Rhetoric from Wilson to Obama: Constructing Crises, Fast and Slow*. N.p.: Taylor & Francis.

Wiratama, Daniel T. 2017. “The Golden Age of China-Taiwan Relations: The Explanation and Its Future.” *Parahyangan Catholic University* 1 (1).

Xie, Frank T. 2018. “Economic &Trade Interdependence between Taiwan (ROC) and China (PROC).” *Journal of Business & Economic Policy* 5 (4).

Yip, Hilton. 2020. “Taiwan's Economic Decoupling From China Is a Model for Others.” Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2020/07/24/taiwan-china-economic-ties-decoupling/.

Yuen, Samson. 2014. “Under the Shadow of China.” *Open Edition Journal*, 70.

Zurcher, Anthony. 2016. “US election 2016 result: Trump beats Clinton to take White House.” BBC. https://www.bbc.com/news/election-us-2016-37920175.